



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN
PLT DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. 13.41 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII
Acara : 1. Performa Penerimaan Negara Sektor Hulu Migas Tahun 2024 dan Target Tahun 2025;
2. Progres Lifting Migas Tahun 2024 dan Target Tahun 2025;
3. Proyeksi Subsidi BBM dan LPG 3 Kilogram Tepat Sasaran Tahun 2025;
4. Proyeksi ICP Tahun 2025;
5. Keberlanjutan Proyek Cirebon – Semarang Tahap II.
6. Lain-Lain.
Hadir : 20 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN:

5 orang anggota dari 10 anggota:

- 1) H. Yulian Gunhar, SH, MH
- 2) H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
- 3) Mercy Chriesty Barends, S.T.
- 4) Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
- 5) Bambang DH

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

2 orang anggota dari 7 anggota:

- 1) Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., **M.Sc.**
- 2) Bambang Patijaya S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 6 anggota:

- 1) Dr. Ramson Siagian
- 2) H. Iwan Kurniawan, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

- 1) Arkananta Akram, S.T., B.E. (Hons),
M.Eng.Sc.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 orang anggota dari 5 anggota:

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

- 1) Rusda Mahmud
- 2) Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

- 1) Ir. H. Tifatul Sembiring
- 2) Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
- 3) Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

- 1) Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, **M.Sc.**

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1) Dr. Ir. Dadan Kusdiana, **M.Sc.** (Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM RI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ibu-Bapak, kita bisa mulai ya? Pak Plt. Dirjen? Ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*
Selamat pagi,
salam sejahtera untuk kita semua,
salam sehat untuk kita semua.

Yang kami hormati, Pimpinan beserta
Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati, Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI beserta jajaran,
Para hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, kita ucapkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan rapat dengar pendapat guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada pagi hari ini.

Sesuai undangan yang telah dikirimkan, Rapat Dengar Pendapat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM hari ini diagendakan sebagai berikut:

1. Performa penerimaan negara sektor hulu migas tahun 2024 dan target tahun 2025;
2. Progres *lifting* migas tahun 2024 dan target tahun 2025;
3. Proyeksi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram tepat sasaran tahun 2025;
4. Proyeksi ICP tahun 2025;
5. Keberlanjutan proyek Cirebon – Semarang tahap kedua;
6. Dan lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 10 dari, 10 Anggota dari 6 fraksi sehingga kuorum telah terpenuhi. Dan semua rapat DPR dinyatakan terbuka kecuali tertutup, oleh karena itu kami mohon kepada Anggota agar rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?



(RAPAT: SETUJU)

Baik, atas persetujuan Anggota, dengan demikian dengan mengucapkan “*bismillahirrahmanirrahim*”, rapat dengar pendapat pada pagi hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: TERBUKA)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami mintakan persetujuan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII bahwa rapat ini selesai dua jam kurang lebih setelah rapat kita mulai dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kita bersama, apa bisa disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik.

Ibu-Bapak yang kami muliakan,

Berdasarkan agenda yang telah kami bacakan tadi, berbagai hal yang akan kemudian disampaikan oleh Bapak Plt. Dirjen beserta jajaran, termasuk juga ini merupakan bahan sebagai masukan untuk kita untuk nanti merancang asumsi dasar makro untuk RAPBN tahun 2025. Oleh karena itu, kami persilakan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk bisa menyampaikan pemaparannya, kami persilakan.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
selamat pagi,
salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Bapak-Bapak Pimpinan, dan
Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,
Hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pagi ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI dengan lima agenda, yang pertama adalah performa penerimaan negara sektor hulu migas 2024 dan target 2025. Kemudian yang kedua ada progres *lifting* Migas 2024, serta target untuk 2025. Kemudian, proyeksi subsidi LPG tepat sasaran tahun 2025. Proyeksi ICP untuk tahun 2025, serta nanti kami terakhir akan menyampaikan progres proyek CISEM tahap II.

Baik, Ibu-Bapak Pimpinan,

Kami akan mulai menyampaikan per agenda. Yang pertama, kami menyampaikan agenda terkait dengan performa penerimaan negara sektor hulu migas 2024 dan 2025.

Dapat kami sampaikan bahwa hingga tahun 2022, *next*, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau dikenal dengan PNBPN SDA migas terus mengalami peningkatan mencapai 148,7 triliun rupiah. Namun pada tahun 2023, sedikit mengalami koreksi di angka 116,98 triliun rupiah dan pada tahun ini status sampai dengan 20 Mei 2024 realisasi PNBPN SDA migas sudah mencapai 36,81 triliun rupiah atau sebesar 33,42% dari target yang telah disepakati dalam APBN, yaitu 110,5 triliun rupiah.

Adapun hasil dari koordinasi kami dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan *stakeholder* yang lain, untuk target PNBPN sumber daya alam migas tahun 2025 diusulkan sebesar 112,2 triliun rupiah.

Berikutnya terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024 sampai 2029, telah disepakati pada Rapat Interdep yang turut melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Bank Indonesia, Bappenas dan SKK Migas, sebagaimana ditunjukkan dalam *slide* ini.

Sebagaimana kita sama-sama pahami bahwa APBN 2024, pertumbuhan ditetapkan 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar 15.000, suku bunga 6,7%, sedangkan ICP ditetapkan pada level 82 *us dollar* per barel. Adapun *lifting* migas ditetapkan sebesar masing-masing untuk minyak 635 dan untuk gas 1.033 atau 1,33 juta setara barel *oil per day*. Namun demikian, terdapat deviasi dalam realisasinya. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,1%, jadi untuk yang kolom 2024 untuk yang kanan, ini proyeksi dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi 5,1% dan inflasi sedikit di atas, mencapai 3,0%. Demikian pula halnya dengan *lifting* migas, di mana masing-masing diproyeksikan mencapai 596 dan 995.000 setara barel *oil* per hari atau di bawah target APBN 2024.

Kemudian target *lifting* untuk 2025 adalah 597.000 barel *oil* per hari untuk minyak dan 1.030, 1,036 juta barel *oil* per hari untuk gas bumi atau kira-kira ini setara dengan 5.843 MMSCFD. Sedangkan untuk ICP sebesar 80 *us dollar* per barel. Adapun angka untuk PNBPN SDA migas, seperti tadi disampaikan adalah sebesar 112,2 triliun rupiah dengan asumsi untuk *cost recovery*, *baseline*-nya sebesar 8,52 miliar rupiah.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat,

Kebijakan PNBPN SDA minyak dan gas bumi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah mencakup, pertama adalah menjalankan upaya penyempurnaan regulasi, baik itu berupa peraturan maupun kontrak perjanjian, serta perjanjian, serta perbaikan dari tata kelola industri hulu migas. Yang kedua adalah mendorong upaya peningkatan *lifting* migas. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan



pengendalian operasional kegiatan hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas. Kami sedang menyelesaikan Kepmen untuk hal ini.

Kemudian yang keempat adalah meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui berbagai macam teknologi. Kemudian yang kelima, mendukung efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu atau HGT sesuai dengan Perpres Nomor 121 Tahun 2020. Kemudian yang keenam, mendorong digitalisasi proses-proses bisnis.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Slide berikutnya berlanjut kepada agenda yang kedua, adalah progres *lifting* migas 2024 dan target untuk 2025. *Lifting* migas pada APBN 2024 dengan rincian sebagai berikut, yang pertama adalah untuk *lifting* minyak bumi sebesar 635.000 barel per hari, dan *lifting* gas bumi sebagai, sebesar 1.000, 1,033 juta barel ekuivalen *oil* per hari.

Dapat kami laporkan bahwa realisasi *lifting* minyak bumi sampai dengan Maret 2024 sebesar 567.000 barel per hari atau mencapai 89,4% dari target APBN. *Lifting* gas bumi mencapai 885,4.6000 barel *oil* ekuivalen per hari atau setara dengan 85,7% dari target APBN. Adapun untuk target 2025, *lifting* minyak bumi sebesar 597.000 BOPD dan untuk *lifting* gas bumi ditargetkan 1.036, 1,036 juta BOPD. Hampir sama dari sisi angka, sedikit naik dibandingkan dengan tahun 2024 untuk yang gas bumi.

Kemudian dalam mencapai target tersebut tentunya dengan strategi dan upaya produksi *lifting* migas nasional beberapa antara lain, yang pertama adalah *Improving Existing Asset Value* melalui peningkatan kegiatan pengeboran pengembangan, *workover*, dan juga *well services*, serta kami juga berupaya untuk melakukan reaktivasi dari sumur-sumur *idle*.

Yang kedua adalah transformasi dari, dari sumber daya menjadi cadangan, dari cadangan menjadi produksi melalui proses-proses POD, serta percepatan-percepatan *on stream* dari proyek-proyek hulu migas. Pemanfaatan teknologi terbaru antara lain melalui EOR dan *waterflood* melalui proyek percepatan proyek EOR seperti yang ada di Minas. Kami juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong eksplorasi sehingga terjadinya *discovery* yang, yang besar dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi *offshore*, serta di laut dalam terutama di Indonesia bagian timur. Saat ini terdapat temuan di Layaran dan di Geng North di tahun 2023.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Berikutnya terkait dengan ICP. Untuk realisasi rata-rata ICP dari Januari sampai Mei 2024 mencapai 81,52 US *dollar* per barel. Sedangkan ICP tanggal 1 sampai 30 April bulan lalu, sebesar 87,61 US *dollar* per barel.



Sesuai dengan hasil interdep pada bulan ini, bulan Mei, hingga akhir tahun 2024 perkiraan terbaik kami adalah bahwa harga minyak mentah Indonesia akan berkisar di 77 sampai 84 US *dollar* per barel. Adapun untuk tahun 2025 dengan melihat tren yang ada di tahun ini, dengan melihat berbagai macam kondisi global, perkiraan harga minyak mentah Indonesia adalah 75 sampai dengan 85 US *dollar* per barel.

Kami sampaikan di sini hasil *benchmark* untuk proyeksi tahun 2025 berdasarkan *Short Term Energy Outlook* dari EIA, Amerika. Per 7 Mei 2024, harga minyak untuk WTI diperkirakan pada kisaran 83,05 US *dollar* per barel, sedangkan untuk Brent pada kisaran 87,79 US *dollar* per barel. Adapun dari *Pooling Reuters* berdasarkan pada perbankan dan industri per 6 Mei 2024, didapati untuk WTI sebesar 80,46 dan untuk Brent sebesar 84,62 US *dollar* per barel.

Dinamika harga minyak dunia memang sangat sulit diduga karena tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor *fundamental supply* dan *demand* saja. Ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi harga minyak bumi, seperti pertumbuhan ekonomi global, dan sekarang ada *optimism* bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik secara global sehingga dalam dua, dua hari terakhir pun harga minyak memang sedikit naik, inflasi, dan juga ketegangan politik di kawasan Eropa Timur dan tentunya di kawasan Timur Tengah.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Untuk agenda selanjutnya, yaitu proyeksi subsidi LPG tepat sasaran tahun 2025. Dapat kami laporkan kuota volume LPG 3 kilogram tahun 2024 adalah sebesar 8,03 juta metrik ton. Dan realisasi sampai 30 April sebesar 2,68 juta ton atau sudah mencapai 33,38% dari kuota, saya kira ini sangat, kalau dibicara dari sisi waktu sampai akhir April itu satu per tiga nya dari setahun, dan ini kita juga realisasinya persis di angka satu per tiga sehingga proyeksi kami untuk *outlook* sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar 8,121 juta metrik ton, sedikit lebih dari yang sudah ditetapkan di dalam APBN.

Tren realisasi LPG tabung 3 kilogram terlihat pada grafik yang ditampilkan, yaitu pada tahun 2019 sampai 2022 rata-rata mengalami kenaikan 4,5% per tahun. Kemudian untuk 2022 ke 2023 sebesar 3,2% per tahun. Penurunan persentase kenaikan sebesar 1,3% dipengaruhi oleh hasil dari transformasi tahap I dan peningkatan pengawasan sehingga overkuota di tahun 2023 ini bisa dan berhasil untuk ditekan, dan kami 2024 juga sedang melakukan hal tersebut.

Dengan mempertimbangkan kenaikan volume penyaluran LPG bulan Juli sampai dengan Desember 2022, ke Juli sampai dengan Desember 2023, melalui surat Dirjen Migas kepada Dirjen Anggaran tanggal 16 Februari 2024, maka diproyeksikan kebutuhan LPG 3 kilogram untuk 2025 adalah sebesar 8,17 juta metrik ton.



Bapak-Bapak sekalian,

Kebijakan subsidi LPG 3 kilogram untuk 2025, yaitu dengan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang semakin akurat. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kilogram berbasis teknologi.

Sejalan dengan itu, pengguna LPG tabung 3 kilogram adalah pengguna LPG tabung 3 kilogram yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name, by address*, sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan transformasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Upaya peningkatan LPG tepat sasaran antara lain selain tentunya tadi yang kami sampaikan dari sisi transformasi, yang pertama adalah terus meningkatkan pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran. Status pencatatan per tanggal 19 Mei 2024, terdapat 42,4 juta NIK yang telah terdaftar dalam sistem *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina.

Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan sidang horeka kepada hotel, restoran, dan kafe pada bulan April dilakukan di DKI, Bogor, Depok, Bali dalam rangka pengawasan penyaluran LPG tabung 3 kilogram. Ditemukan bahwa harga LPG untuk tabung 12 kilogram dan 50 kilogram ini jauh di bawah harga LPG tabung 3 kilogram, sehingga ada indikasi terjadinya oplosan. Sebagai contoh misalkan terdapat harga beli konsumen LPG tabung 50 kilogram harganya sebesar 600 ribu untuk yang 50 kilogram, sedangkan harga dari Pertamina itu berada di kisaran 900 ribu rupiah per tabung.

Kemudian yang berikutnya, koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka pemberian keterangan ahli atas perkara penyalahgunaan penyaluran LPG tabung 3 kilogram yang meningkat setiap tahun. Sejak 2022 sampai 2024, terdapat 23 kasus pelanggaran administrasi dan 149 kasus pidana berupa pemindahan isi gas dari tabung LPG 3 kilogram.

Kami juga melakukan pelaksanaan pengawasan dan verifikasi penyaluran isi ulang LPG tabung 3 kilogram setiap bulan. Setiap bulan dilakukan *stock opname* untuk menghitung *gain* dan *losses* di setiap SPPBE, verifikasi kepada agen, pangkalan, dan konsumen, ini dijadikan sebagai faktor koreksi dari volume LPG bersubsidi tersebut.

Kemudian, saat ini kami sedang melakukan revisi Perpres 104 Tahun 2007 tentang penyediaan dan pendistribusian dan penetapan LPG tabung 3 kilogram dalam rangka pengaturan kriteria penggunaan, pengguna isi ulang LPG tabung 3 kilogram. Saat ini sedang menunggu persetujuan Izin Prakarsa.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Agenda berikutnya yaitu terkait dengan keberlanjutan proyek pipa gas CISEM tahap pertama dan tahap kedua, di mana saat ini sudah selesai



dibangun jalur pipa gas ukuran 20 inci dengan panjang 60 kilometer dari Stasiun Semarang sampai stasiun Batang dan sudah mulai beroperasi.

Dapat kami sampaikan bahwa *milestone* pembangunan CISEM tahap I sudah mulai dari *first welding*, pembangunan, kunjungan kerja dari Bapak Menteri dan juga Anggota Dewan, hingga peresmian pada tanggal 17 November 2023. Saat ini juga sudah ada pengaliran gas menuju Kawasan Industri Kendal dan diharapkan kedepannya setelah industri di sana sudah mulai terbangun, maka di *demand* dari gas akan semakin meningkat dan pemanfaatan pipa CISEM juga akan menjadi semakin optimal.

Dapat kami laporkan bahwa untuk pembangunan jaringan pipa transmisi gas CISEM tahap kedua sebagai berikut, total panjang ruas pipa Batang sampai dengan Kandanghaur Timur sekitar 245 kilometer dengan kebutuhan anggaran total sebesar 3 triliun rupiah. Durasi pekerjaan konstruksi berdasarkan **FPS/EPS/EPC (menit ke-21:57)** selama 17 bulan kalender atau 510 hari dimulai dari bulan Juli tahun ini dan kita targetkan selesai di akhir tahun 2025.

Terkait dengan penganggaran, surat reviu BPKP telah terbit dengan tanggal 15 Maret 2024, anggaran untuk manajemen konstruksi telah tersedia. Saat ini anggaran EPC CISEM dan layanan dalam proses buka blokir yang mana telah dilaksanakan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran tahun, pada tanggal 19 April 2024. Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII terkait dengan revisi dari anggaran untuk CISEM ini.

Terkait persetujuan *multiyears*, telah terbit surat dari Menteri Keuangan perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Konsultan MK CISEM-2 tanggal 28 Maret 2024 dan permohonan persetujuan *multiyears* untuk EPC CISEM akan diajukan dalam tiga tahun anggaran setelah proses buka blokir ini selesai, jadi kami sedang menyelesaikan untuk dua-duanya proses buka blokir dan juga untuk persetujuan *multiyears*-nya.

Dari sistem pengadaan, dapat kami laporkan bahwa konsultan MK telah berkontrak sejak 2 April 2024. Paket tender EPC dan pengadaan material pipa transmisi dilakukan dalam satu kesatuan, satu kesatuan tender dan tender EPC tayang lelang sejak April 2024 dan sudah dilaksanakan penjelasan lapangan dengan target berkontrak pada bulan Juli 2024.

Bapak-Bapak Pimpinan, dan
Ibu-Bapak Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Demikian penjelasan dan laporan kami mengenai topik yang telah diagendakan. Selanjutnya, kami mengharapkan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI.

Sekian, terima kasih.



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Kalo boleh diperkenalkan direktur-direktornya. *Kan* beliau ini Plt., supaya tau nih kayaknya baru-baru semua direktornya.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan, silakan Pak.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ada satu yang tidak hadir, Pak Noor Arifin Muhammad, sekarang lagi mewakili Pak Menteri untuk rakor di kantor Menko Marves, beliau nanti akan menyusul. Di sebelah kanan saya Pak Mirza, beliau adalah Direktur untuk Pembinaan Program Migas. Kira-kira kalau gambaran yang paling umum apa, tugasnya adalah yang alokasi, alokasi-alokasi ini adanya di beliau.

Kemudian Ibu Mustika, Direktur Hilir. Jadi kalau LPG ada di beliau, kemudian untuk BBM ada di Bu Mustika. Kemudian Pak Laode, ini yang terkait dengan infrastruktur Pak, Direktur Infrastruktur Migas. Jadi yang bertanggung jawab untuk konkrit, nah ini adanya di beliau. Kemudian Pak Maompang, beliau Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, melakukan koordinasi atas berbagai macam hal. Kemudian Pak Mustafid, sebelumnya adalah Direktur Hulu sekarang adalah Kepala Balai Besar Migas atau disebut dengan LEMIGAS. Satu lagi sedang mendampingi Pak Menteri, Direktur Hulu Migas, jadi sedang berada di Cina, jadi ada dua yang tidak hadir tapi yang satu nanti segera akan menyusul.

Demikian.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Yang Hulu Migas namanya Pak siapa, Pak?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Pak Ariana.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Plt. Dirjen atas pemaparannya.

Kami persilakan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII untuk bisa melakukan pendalaman, memberikan tanggapan atau pertanyaan atas pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Plt. Dirjen.

Kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan, silakan Pak Bambang.

F-PDIP (BAMBANG DH):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang juga sangat kami hormati,

Terkait apa, tren apa, produksi dan capaian, mudah-mudahan optimisme Pak Dirjen betul-betul bisa apa, meyakinkan kita semua. Saya pada saat reses ini saya kebetulan menerima curhat ya dari calon pelanggan gas. Ini pabriknya pabrik keramik, sudah investasi 2 triliun di Jabar, di Subang. Ketika mau mengajukan pemakaian gas, ternyata regulasinya mudah-mudahan *ndak* benar sih, tapi ini disampaikan ke saya langsung pada saat reses, itu harus jadi pelanggan enam bulan dulu. Wah kalau caranya begini, sementara produksi naik, kita berharap apa, penyerapan juga tinggi, kalau regulasinya seperti ini *kan* menghambat. Kenapa *ndak* dibuat misalnya dari pengajuan dan investasi yang ada *kan* bisa dicek di lapangan. Ini keperluan pemakaian gasnya berapa dan dengan investasi sebesar itu *kan* ada harapan bahwa gas ini akan terserap.

Mohon tanggapan terkait dengan regulasi itu benar tidaknya. Kalau benar, saran saya ya mesti dilakukan perubahan. Kalau cukup di eksekutif ya silakan dikerjakan, kalau memang perlu dukungan kawan-kawan di dewan, ya kita *kan* pasti *support* ya *gitu*. Saya rasa dari saya itu *aja*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih.

Lanjut Fraksi Partai Golkar, Ibu Roro silakan.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., **M.Sc.):**

Baik, terima kasih.



*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati, Pak Eddy, Pimpinan,
Para Anggota Komisi VII yang saya banggakan, dan dalam hal ini
Pak Dadan dan seluruh jajaran yang hadir dari Kementerian ESDM.

Jadi yang pertama *gini*, kemarin juga saya sempat utarakan ketika rapat dengan Pertamina ya, terkhusus mengenai target kita satu juta *barrel per day* di tahun 2030. Nah, maka kalau kita melihat bahwa trennya itu hingga detik ini menurun, tadi juga telah dipaparkan bahwa target untuk tahun 2024 berada di kisaran 635.000 *barrels of oil per day* dan realisasinya sekarang berada di angka 567,65 ribu *gitu* ya, nah maka melihat tren seperti ini saya rasa kita harus evaluasi ulang *gitu* terkait target yang selama ini sudah kita canangkan dan kita harapkan bisa terealisasi.

Dan kalaupun, saya justru dalam posisi kepingin tanya, menanyakan hal ini kepada Kementerian ESDM, berapa optimisnya, seberapa optimisnya sih sebetulnya *gitu*, untuk betul-betul mencapai target, seperti itu. Namun saya melihat tadi di *slide* nomor 9 ya, tren yang berkaitan mengenai *lifting gas*. *Lifting gas* ini memang secara keseluruhan kelihatannya menurun, *relatively* menurun, tapi trennya sempat terjadinya kenaikan *gitu*, misalnya dari 2020 ke 2021 kita melihat ada kenaikan. Dari 2022 ke 2023 juga ada sebuah kenaikan. Nah kami berharap bahwa kita, ya negara Indonesia, itu bisa terkhusus di sektor energi ini betul-betul memetakan bagaimana kita kedepannya harus mulai untuk *diversify energy portfolio* kita *gitu*. Apakah kemudian ini merupakan peluang tersendiri untuk kita mengeksplor energi-energi alternatif lainnya yang kemudian bisa menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi negara kita. Apalagi dengan proyeksi Indonesia, misalnya dengan Indonesia Emas tahun 2045, dengan menjadi salah satu ekonomi terbesar mengoptimalkan dari bonus demografi, ini tentu akan beriringan dengan permintaan energi yang akan semakin meningkat.

Nah oleh karena itu, saya melihat bahwa gas ini merupakan salah satu sumber energi yang sangat amat penting ya, penting untuk kemudian kita *shifting* menuju yang selalu kita canangkan mengenai transisi energi dan lain sebagainya. Nah, maka saya ingin menanyakan karena tadi kalau untuk *lifting, lifting* apa, minyak itu *kan* kita ada target ya. Tapi kalau misalnya terkhusus untuk gas *gitu, is there*, kita punya *nggak* sih spesifik target untuk misalnya dalam *kurunan* waktu 10, 5 tahun-10 tahun ke depan? Dan jika ada, mohon di-*share* kepada kami targetnya seperti apa. Lalu kemudian langkah-langkah strategis yang harus ditempuh, itu kemudian seperti apa, agar kami mempunyai gambaran besar *portfolio* misalnya untuk minyak proyeksi seperti ini, untuk gas khususnya seperti apa. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan.

Yang kedua, sebetulnya lebih terhadap beberapa kelangkaan LPG, gas LPG 3 kilogram ini di beberapa wilayah. Kalau saya baca itu ada di wilayah, beberapa wilayah di Jawa Tengah, lalu kemudian di Jawa Timur, karena saya mewakili wilayah Jawa Timur juga, ada beberapa kabupaten yang mengalami kelangkaan. Nah maka strategi apa yang kemudian dapat ditawarkan oleh



Kementerian ESDM beserta seluruh *stakeholder* yang terlibat ya, karena tentunya ini bukan hanya ranahnya Kementerian saja.

Bagaimana kemudian ke depannya kelangkaan-kelangkaan itu bisa terobati dengan apa namanya, *supply* yang kemudian bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Karena kebutuhan apa, gas LPG 3 kilogram ini kan macam-macam ya, ada yang untuk memang berbasis rumah tangga, ada yang berbasis mungkin bisnis-bisnis kecil *gitu*, dan saya rasa jangan sampai masyarakat di lapangan, kita sebagai wakil masyarakat selalu apa, dihadapi dengan permasalahan-permasalahan seperti ini di lapangan dan saya rasa penting buat kami yang berada di DPR ini menggunakan hak suara ini untuk betul-betul memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang selalu kami dengar di lapangan. Itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Ibu Roro.

Mungkin tadi yang disampaikan Ibu Roro terkait kelangkaan gas tidak hanya LPG saja, tetapi gas secara keseluruhan. Karena sekarang pelanggan-pelanggan PGN pun terkendala dan sekarang harus terpaksa menerima apa, pasokan gas yang berkurang, itu juga mungkin nanti bisa dijawab pertanyaannya, Pak.

Silakan Fraksi Partai Gerindra. Pak Ramson silakan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Soalnya saya persilakan dulu sama Pak Calon Gubernur, ya. Jadi di Fraksi Gerindra itu yang dibahas baru calon kepala daerah, kalau calon menteri masih senyap, belum terdengar sedetikpun, iya, jadi calon-calon kepala daerah.

Makasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua Rapat, Pimpinan, dan teman-teman Anggota yang terhormat,
Pak Plt. Dirjen Migas, serta
Semua jajaran yang saya hormati,



Terima kasih atas penjelasannya. Dari asumsi dasar ekonomi makro yang disampaikan di sini, bahwa untuk *range* 2025, karena kita *udah* harus membahas RAPBN ini tentu sebagai referensi nanti untuk Bapak Presiden menyampaikan rancangan APBN pada tanggal 15 Agustus. Jadi ini saya lihat bahwa kalau harga minyak mentah memang antara 75 ke 85 ini memang saya lihat *range*-nya masih cenderung realistis tapi bergejolak. Artinya memang faktor-faktor geopolitik memengaruhi, tetapi juga tren transisi energi di, secara global sekarang juga memengaruhi harga minyak juga. Jadi ada pengurangan *demand* minyak.

Terus yang saya lihat di sini *lifting* minyak mentah. Kecenderungannya betul-betul menurun, bahwa untuk 2025 juga menurun. Gas bumi di sini diproyeksikan ada peningkatan. Jadi saya melihat bahwa penurunan *lifting* minyak ini sudah secara reguler dari tahun ke tahun. Ini memang yang suatu saat perlu dijelaskan oleh Kementerian ESDM, tapi di satu sisi peluang kita untuk meningkatkan *lifting* gas juga cukup besar.

Saya lihat di sini, dari 2024 ke 2025 hanya sedikit peningkatan proyeksi *lifting* gas, padahal kita memerlukan lebih besar volume gas karena *demand* gas akan meningkat, selain untuk industri-industri dan juga apalagi pengembangan jargas, juga dalam proses transisi energi permintaan untuk gas akan meningkat. Karena tentunya tidak mungkin kita langsung loncat semua ke listrik. Jadi ini sangat diperlukan, sementara cadangan gas kita sangat besar. Ini sebenarnya yang perlu ada *priority strategy* dari pemerintah untuk bagaimana memompa agar peningkatan *lifting* gas itu betul-betul signifikan. Jadi tidak *business as usual*, ini yang perlu juga diarahkan oleh Dirjen Migas, dalam hal ini juga Kementerian ESDM kepada SKK Migas sebagai lembaga yang juga langsung operasional untuk menggerakkan para KPS untuk meningkatkan produksi gas masing-masing atau *lifting* gas masing-masing. Ini harus ada simultan antara pemerintah juga dengan SKK Migas sehingga semua tidak *business as usual*.

Karena selain juga bahwa *demand* gas di Republik ini meningkat, antara lain juga faktor transisi energi juga akan meningkatkan pendapatan negara. Jadi juga di satu sisi jangan sampai kita harus mengimpor gas nanti dengan peningkatan permintaan gas dalam negeri. Ini harus perlu dibuat strategi yang tepat. Terus yang berikutnya, saya lihat kalau mengenai harga memang tadi fluktuatif oleh faktor geopolitik.

Terus mengenai LPG, bahwa di sini prognosanya 8,12, 8.121.000 metrik ton dan proyeksi 8.170.000 metrik ton. Ini perlu diteliti lagi, dicek bagaimana peningkatan kebutuhan di masyarakat, khususnya LPG 3 kilogram. Tetapi di satu sisi, di sini disampaikan data bahwa ada hasil riset ataupun survei di lapangan dari pihak pemerintah bahwa, harga beli LPG non subsidi itu bisa lebih murah dari harga standar yang ditentukan oleh pemerintah. Ini di sini disampaikan data dari, yang seharusnya 900 ribu menjadi 600 ribu untuk yang LPG 50 kilogram.

Kebetulan Pak Dirjen, Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan dengan timnya menemukan kecurangan-kecurangan di SPBE. Nah ini juga apa



namanya, meng-*encourage* untuk berpikir lebih, lebih dalam bahwa memang yang potensial untuk kecurangan itu justru di hulu, di SPBE. Ini sebagai contoh ya, bisa saja, bisa saja jatah LPG 3 kilogram dikurangi, karena dari data itu *kan* dikurangi, tadinya 3 kilogram menjadi 2,2, ada yang 2,5, jadi 500 gram. Ini bisa dipindahkan ke yang harga pasar, yang 50 kilogram atau yang lebih, pokoknya yang di atas 3 kilogram. Karena isinya juga *kan* di SPBE, yang 3 kilogram sama yang non 3 kilogram *kan* isinya di SPBE. Jadi yang potensial bisa memindahkan di situ secara cepat, di situ. Itu sebenarnya Dirjen Migas yang perlu juga reguler untuk melakukan apa namanya, pemeriksaan.

Kemarin keputusan rapat dengan Pertamina *udah* kita buat supaya diaudit secara reguler, audit lapangan semua SPBE. Tapi justru Ini saya lihat Dirjen Migas mencecar pangkalan-pangkalan. Pangkalan-pangkalan *kan* volumenya kecil hanya berapa kilo, dia bagaimana dia mau memindahkan itu. Sekarang untuk pangkalan-pangkalan terlalu banyak birokrasi, mereka itu pangkalan-pangkalan seperti daerah pemilihan saya, paling hebat keuntungan mereka perbulan 2,5 juta ke 3 juta satu pangkalan itu. Kadang- kadang birokrasinya sangat, sangat apa, agak ruwet *gitu*. Memang buat di sana, 2,5 juta itu *udah* sangat besar Pak, ke 3 juta perbulan, mereka sangat *happy*, karena apa? Kalau UMR sekitar 2,2 ke 2,3 juta. Mereka kalau pangkalan biasanya kerjanya juga tidak *full* 30 hari, mungkin per minggu hanya dua hari, tiga hari, mungkin bisa mengerjakan pertanian atau sawah atau yang lain.

Jadi mereka sangat senang sebenarnya dengan penghasilan itu, tapi ini apa namanya, agak dicecar juga mereka. Mereka kebetulan sesudah pemilu kemarin, selesai perhitungan, tiga minggu sesudah pemilu saya masih di dapil, sesudah itu agak lama tidak ke Dapil. Kira-kira sepuluh hari yang lalu saya ke dapil, mereka menyampaikan juga apa namanya, keluhan-keluhan yang dihadapi oleh pangkalan-pangkalan. Nah ini bagaimana dari pihak Dirjen Migas untuk apa namanya, memberikan solusi-solusi yang baik ke pangkalan, tetapi harus ketat ke SPBE, jadi langsung.

Terus yang kedua, birokrasi-birokrasi juga sekarang ada berkembang seperti di daerah lain, dinas ESDM dari provinsi ikut menangani-menangani juga. Nah, ini harus tegas dari Kementerian ESDM bahwa itu karena APBN langsung yang mengelola itu dari Kementerian ESDM, itu soal LPG tadi.

Terus soal untuk jargas. Jargas ini terutama ini sekarang *kan* lagi dibangun CISEM. CISEM ini melewati daerah pemilihan saya, Pak. Bukan saya fokus ke pemilihan saya, Pak Ketua, tapi lewat Pekalongan. Nah ini tolong dipercepat. Pekalongan itu kota, jadi kota memang konsumen LPG 3 kilogram itu kecil karena dia kota kalau Pekalongan. Terkecuali kawasan Pekalongan ke sana, itu konsumen LPG 3 kilogram besar. Jadi di kota-kota ini bagus juga itu kalau dilewati pipa itu nanti *udah, udah on gitu*, Pak. Jadi itu perlu dipercepat juga.

Saya pikir secara nasional, juga jargas ini perlu dipercepat, tapi di satu sisi tadi *lifting* apa, strategi untuk mengembangkan *lifting* gas juga harus seirama, Pak. Karena dengan pembangunan-pembangunan jaringan pipa transmisi gas, berarti akan menambah permintaan karena infrastruktur ini

membuat masyarakat lebih mudah, jadi ada akses, akses energi. Ini akses, *accessibility* ini salah satu indikator *energy security* juga Pak. Jadi itu sangat penting. Itu nanti mereka akan mendapatkan energi yang lebih murah, yang terjangkau. Nah ini strateginya harus dipikirkan ke sana secara menyeluruh sehingga seirama *gitu*. Memang harus dikelola secara sektoral juga, jadi maksud saya bukan hanya Dirjen Migas – Dirjen Migas, Dirjen Migas juga harus koordinasi dengan PGN, juga dengan PHE, Hulu Energi, juga SKK Migas harus digerakkan juga semua sebenarnya untuk mencapai *goal* ini.

Di satu sisi, tadi itu transisi energi untuk mencapai *net zero emission*, tapi di satu sisi masyarakat punya akses dan punya, mendapatkan energi yang murah, tapi juga ada akses memperoleh energi yang murah itu. Nah itu harus dibuat suatu strategi yang tepat. Itu aja, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Lanjut dari Fraksi Partai Nasdem. Oke, kita *pass* ya, jadi. PKB engga ada? Kalau *gitu* langsung ke Fraksi Demokrat, silakan Pak Hendrik.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL, MM):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi VII yang saya hormati, dan juga Pak Dirjen, Pak Dadan beserta jajaran yang saya hormati,

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua.

Terima kasih Pak Dadan sudah memaparkan materinya dan kelihatannya sangat berusaha meyakinkan Komisi VII atas kinerja dari Migas.

Pertama yang mau saya tanyakan, ini pelan-pelan ini Pak Dadan nih. Pertama yang saya tanyakan, saya sangat prihatin di halaman empat, Pak, PNBPN. Ini juga saya *ndak* tau kenapa bisa terjadi seperti ini turunnya dan memang ini *nggak* salah Dirjen Migas, *ndak*, ini adalah salahnya operatornya. Operator itu salah satu apa, kumpulan dari K3S begitu ya Pak kalau *nggak* salah ya, itu yang saya kira salah satu sumber PNBPNya.

Nah ini apa yang harus dilakukan Dirjen Migas selaku pemangku kebijakan di negara ini? Karena saya lihat, saya amati, Pak Dirjen, para pengusaha-pengusaha K3S ini ketika ini turun *lifting*-nya, bukannya, bukannya

apa namanya, murung *gitu*, senyum-senyum aja mereka. Ini *kan* perlu dilihat apa sebenarnya yang terjadi penurunan mereka.

Saya kira Pak Dirjen perlu mendalami ini, para pengelola pengelola K3S ini, Pak. Mereka *happy* kok walaupun turun. Ya ini kita harapkan sebagai pemangku kebijakan, betul-betul mendalami apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi di proses *lifting* kita. Apa benar-benar memang turun *gitu loh*. Akhirnya berdampak PNBP kita, Pak.

Saya lihat ini apalagi terkait dengan *lifting* ini kita Pak, turun juga. Jadi sekali lagi Pak Dadan, tolonglah, saya minta tolong nih supaya Dirjen Migas betul-betul mendalami bersama-sama SKK Migas. Apa benar ini turun *gitu loh*, *lifting* kita. Dan saya lihat ini yang halaman tujuh, kebijakan PNBP SDA minyak gas bumi, saya lihat ya Pak, yang Bapak sampaikan ini hanya basa-basi *aja*, tidak konkret *gitu loh* Pak kebijakannya. Harusnya konkret, menggigit *gitu loh*, supaya PNBP kita naik *gitu*. Makanya saya sangat, sampaikan sebelumnya, ya PNBP ini di *flat* aja setiap tahun *gitu loh*, supaya konsisten ini pendapatan negara kita.

Nah ini kembali lagi saya serahkan kepada Dirjen Migas supaya mendalami kenapa ini terjadi. Kenapa di migas nih kita turun *gitu loh*, di minyak nih, di PNBP-nya. Jadinya kebijakan ini saya kira belum, *ndak* strategis ini Pak, yang enam ini enggak, belum ada langkah-langkah konkret itu belum-belum ketemu saya lihat.

Termasuk juga, Pak Dirjen, ketika kita sumur-sumur *lifting* kita apa, sumur-sumur itu menghasilkan BBM ataupun apa isinya, saya kira perlu diawasi Pak. Apa sebenarnya yang dihasilkan dari sumur-sumur kita ini? Saya hanya khawatir aja SKK Migas juga tidak optimal melakukan pengawasan kepada para K3S ini. Apa sebenarnya yang muncul, yang dihasilkan pada sumur-sumur itu? Saya minta tolong kembali lagi, Dirjen Migas harus hadir di sana. Kelihatannya SKK tidak optimal dalam pengawasannya. Jadi kelihatannya ya sudah turun *lifting*, turun PNBP, *udah* seperti itu *aja*. Kayaknya biasa-biasa saja *gitu loh*, engga boleh, *gitu*. Kita sudah diamanahkan oleh negara ini mengelola ini, menugaskan, menjaga kebijakan ini, ya harus kita jaga baik *gitu loh*, *gitu*.

Sama yang di sebelas Pak, upaya peningkatan produksi *lifting*. Ini juga *ndak*, maksud saya tuh kurang strategis *loh* Pak, apa konkretnya *gitu loh* Pak? Ini masih apa namanya, *casing*-nya aja *gitu loh*. Apa langkah-langkahnya Pak? Dari delapan ini, saya kira ini ah saya basa-basi juga nih, yang penting ada lah tulisan ini *gitu loh*, nah konkretnya *nggak* ada *gitu loh*, ya. Jadi kita harapkan Dirjen Migas sebagai pemangku kebijakan betul-betul mendalami bagaimana *lifting* kita bisa naik Pak, tanggung jawab kita bersama lah, tidak hanya Dirjen Migas, kita juga.

Baik, itu saya kira terkait itu dan juga terakhir untuk terkait dengan *lifting*, Pak Dirjen tolong diawasi juga. Ketika minyak ataupun gas yang keluar dari sumur, ke mana mereka letakkan itu Pak? Kemana mereka, *store*-nya ke mana Pak? *Storage*-nya ke mana Pak? Coba Pak, dalami Pak, pasti Bapak ada



temuan di sana. Ke mana mereka tempatkan itu, sebelum mereka jual kemana-mana. Ini terkait juga PNPB Pak, juga *lifting* kita. Saya yakin pasti Pak Dirjen kalau serius, pasti ada mendapat temuan di sana, semua K3S. Baik, itu terkait dengan *lifting* kita.

Pak Dirjen, Pimpinan boleh *nggak* interaktif sebentar? Pak Dirjen, hari ini berapa kebutuhan BBM kita Pak, yang domestik maupun impor, berapa Pak, berapa? Oke, oke, nanti nanti.

Maksudnya begini Pak, terkait BBM juga, seperti yang kita sampaikan kemarin. Saya tidak tau sampai sejauh mana Dirjen Migas mengawasi alur perdagangan BBM di Indonesia ini. Saya yakin jual BBM, jual minyak ini tidak seperti jual apa, minuman Aqua itu seperti itu mudah gitu. Pasti ada proses dan *storage* dan macam-macam, dan ini sangat spesifik sekali BBM ini, artinya mudah terpantau sebenarnya, ya. Tapi hari ini Pak, saya sangat khawatir perdagangan BBM, khususnya industri di Indonesia ini. Saya *ndak* tau para pedagang atau istilahnya INU atau apa, apa namanya agen tuh, mereka dapatkan minyak dari mana? Saya *ndak* tau *gitu*, Pak.

Makanya hari ini, bisa disampaikan bahwa kalau kita kenal juga *money laundry*, hari ini saya nyatakan bahwa di Indonesia ini terjadi *oil and gas laundry*. Karena apa? Karena ada, ada BBM, ada minyak yang tidak seharusnya, yang tidak harusnya mereka miliki tapi dilakukan perdagangan gelap di pasar.

Kasih contoh, Pak Dirjen. Ketika ada satu institusi, lebih dia kuotanya, dia jual itu kelebihan itu, kelebihan itu dikirim kepada PT A. Yang pasti, Pak Dirjen, setiap transaksi BBM itu harus ada pajak, ada minimal dua pajak di sana, **P bahan** bakar dan PPN, ini harus keluar. Artinya negara harus punya hak di sana, tapi transaksi ini tidak keluar, karena apa? Karena mereka main antara PT A dan PT B dan *user*, mereka buka faktur pajak tapi itu bodong semua.

Pak Dirjen harus ke dalam Pak. Ini luar biasa ini perdagangan kita di, di Indonesia ini Pak. Jadi saya minta Dirjen Migas betul-betul dalam ini, khususnya maka saya katakan, semua INU, niaga umum itu, harus dipanggil, tanyakan dari mana minyak mereka. Karena saya yakin di waktu mereka mengajukan INU, mereka harus ada syarat-syaratnya, minimal ada *storage*-nya. Pertanyaannya, lihat *storage*-nya, pernah *nggak storage* mereka itu disinggahi minyak? *Ndak* pernah, Pak. Itu terbang semua itu minyak kemana-mana.

Nah ini yang saya maksud, tolong diawasi, Pak. Panggil tuh INU tuh semua, dari mana BBM mereka. Belum lagi yang di *blending* lagi, belum lagi yang seperti yang di Sumatera Selatan lagi, yang sumber-sumber minyak yang *ndak* jelas lagi. Jadi banyak Pak, dan ini sebagai Dirjen Migas harus mengawasi ini, *gitu loh*. Jadi saya ingatkan ke Bapak supaya dia, harus memanggil Pak, tanyakan dari mana minyak mereka, supaya diatur Pak semua, kalau dibebas ini kacau. Akhirnya hak dari institusi, ada hak orang, itu yang jadi produk mereka, yang menjadi barang mereka untuk mereka jual belikan.

Ini sangat saya khawatir, ini contoh Pak, ini contoh case. Ketika ada BUMN melakukan tender ya, pengadaan BBM, dan luar biasanya BUMN ini tidak menggunakan sinergitas BUMN, artinya dia membebaskan semua boleh masuk dalam pengadaan. Yang herannya Pak, Pak Dirjen, bisa saja mereka memberikan diskon lebih tinggi daripada Pertamina. Ini *nggak* bener. *Nggak* bener ini, pasti ada yang, kalau jaraknya tipis *nggak* apa-apa, Pak Dirjen, ini jaraknya besar *loh*. Dari mana itu mereka BBM-nya? Dan yang saya, transaksi yang terjadi Pak, jadi antara INU bermain ini Pak supaya hilang jejak. INU ke INU main, INU ke INU main, jadi hilang dia. Dari mana sumber minyak ini? Jadi seakan-akan PT A lah sumbernya, dialihkan lagi ke PT B lagi, dialihkan lagi, seperti itu berputar-putar mereka lakukan. Jadi ini membahayakan, Pak.

Saya hanya konsentrasi bagaimana PNBP negara ini mendapat atas transaksi dari penjualan BBM, itu konsentrasi kita, sekaligus penataan terhadap proses bisnis yang ada di **... tidak terdengar jelas rekamannya (57:59)...** di Migas. Itu Pak, Pak Dadan, jadi saya mohon itu. Kalau perlu kita khusus untuk mengungkap ini, kita punya data untuk mengungkap ini, bahwa ada praktik-praktik INU di Indonesia ini yang gelap. Kita heran, cuma hanya *brand aja*, tapi minyaknya *nggak* ada, tapi transaksi ada juga. Dia pakai INU itu untuk transaksi minyak-minyak ilegal. Jadi saya mohon itu Pak, sesuai dengan apa kita, tolong itu data supaya saya dalam, biar saya beritahu Pak, ini-ini triknya Bapak mengawasinya, pasti ketemu, bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Berikutnya terkait LPG 3 kilo, dan saya ada dengar di dapil saya kemarin datang uji petik, dan itu di-*sampling* ya. Saya berharap kalau uji petik Pak, tolonglah disampaikan kami, karena masih banyak sebetulnya juga lagi pangkalan-pangkalan yang nakal *gitu loh*, agen dan pangkalan yang nakal. Kami bisa tunjukkan nanti, karena kalau kami pegang nanti susah kalau, Bapak aja yang memegang. Beritahu, kalau kami uji petik kasih tau sama kami, kami tunjukkan ini Pak, ini, ini dia, ini dia yang nakal-nakal itu, kita tunjukkan Pak, tapi yang baik juga harus kita kasih tau juga. Itu kira-kira, Pak.

Jadi kita harapkan nanti kalau uji petik, tolong dikoordinasi ke kita, kita akan tunjukkan nanti mana agen dan pangkalan yang nakal-nakal supaya kegiatan-kegiatannya bisa kita awasi.

Dan juga kita kemarin mendengar dari RDP Pertamina Pak, Pak Dadan, katanya subsidi LPG 3 kilo jebol katanya, 2024 ini, anggaran jebol katanya, saya *nggak* tau jebolnya mana nih, ya. Mungkin minta tanggapan dari Migas karena jebol anggarannya. Jadi kita harapkan jangan sampai jebol-jebol lah, kalau jebol-jebol artinya nanti masyarakat yang terbatas memenuhi kebutuhan LPG 3 kilonya, Pak. Jadi mohon penjelasan bagi kita, supaya ini jangan sampai terganggu.

Yang terakhir, saya kemarin ketika Pak Menteri Perdagangan melakukan inspeksi lapangan sidak itu, saya sangat kecewa, kenapa? Karena ESDM tidak hadir di sana. Harusnya Kementerian ESDM ada di sana, tapi Kementerian Perdagangan yang ada di sana, *gitu loh*.

Jadi selanjutnya kami harapkan kalo sidak-sidak itu bersama-sama *gitu loh* Pak, jangan sendiri *gitu loh*. Supaya tau yang teknisnya yang mana, yang regulasi ini di mana, karena dua, dua regulasi kadang-kadang berbeda *gitu loh*, antara Kementerian *nggak* sama juga, kira-kira *gitu*.

Terima kasih, Pimpinan.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

**SEMULA: H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI
MENJADI: (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/
KETUA KOMISI VII DPR RI**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII
DPR RI):**

Luar biasa, Pak Hendrik.

Jadi Pak Dirjen, bagaimana layaknya seorang investigator Pak Hendrik, jadi tau betul kondisi lapangan. Kalau orang kampus bilang antara *das Sein* dan *das Sollen*, nah dia ada di situ. Jadi mohon menjadi perhatian, jadi beberapa catatan tadi termasuk adanya INU yang tidak beres dan sebagainya-sebagainya, saya kira itu betul. *Mosok* ada samping saya orang jual, bisa jual minyak sampai jauh di bawah harga Pertamina itu agak *nggak logic* kalau tidak penyelundupan. Nah itu *loh*.

Jadi ini yang juga memang isu itu mudah-mudahan sekedar isu, bukan menjadi sebuah kenyataan, karena begitu luasnya kita, negeri kita dengan potensi selundupan di sana-sini. Tapi itu sekali lagi nanti coba kita dalam bersama, kalau memang kita memerlukan tim investigasi-investigasi, itu saya kira penting juga nanti dengan lintas komisi karena ini pasti kalau *udah* menyangkut penyelundupan yang melibatkan banyak pihak ini, jadi itu. Terima kasih Pak Hendrik atas penekanan-penekannya.

Dilanjutkan dari PKS, nanti dalam putaran kedua ada Golkar, ada PDI, segala. Dipersilakan, Pak Mulyanto yang terhormat.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng):

Baik, terima kasih.

Yang terhormat, Pimpinan Komisi VII,
Rekan-rekan Anggota,
Bapak Dirjen dan jajarannya.

Presentasinya banyak sekali bahannya. Saya ingin menyoroti hanya satu atau dua hal saja. Yang pertama terkait *lifting* migas, khususnya *lifting* minyak dan target satu juta barel per hari, saya rasa kita berhenti saja bermimpi



dan berhalusinasi, ini *halu* ini, terus terang aja ini *halu*. Saya hampir lagi tamat ini jadi Anggota DPR, target *lifting* itu terus turun, kenapa? Ya emang *udah di-case* secara alamiah itu, menurun.

Yang kedua, ketika isu, wacana, dan menjadi gerakan energi baru terbarukan termasuk target-targetnya di Dewan Energi Nasional, turun memang. Akibatnya jangan heran kalau kompetisi di para industriawan atau investor minyak, bukan hanya industri apa, kompetisi antar perusahaan, di dalam perusahaan juga terjadi kompetisi antara migas dengan EBT. Di mana mau dialirkan ini modal.

Jadi saya melihat kalau investasi terus menurun, lalu sebagian perusahaan besar minyak Indonesia juga ya tidak memperpanjang, kalau dikatakan henggang lah dari negeri ini. Sekarang aja ini *udah* senja kala. Jadi kalau kita masih berhalusinasi satu juta barel, termasuk Komisi VII, semangat setiap membahas *gini* nih, nanti kita ngotot tinggi angkanya, akibatnya jauh sekali *drop*-nya itu setiap tahun. 2024 kemarin kan *gitu*, angkanya kita pasang tinggi ya *kan*. Sekarang *mah nggak* usah dipasang tinggi-tinggi ya *kan*, *samain* aja *gitu*, karena percuma *gitu*, jadi halusinasi. Saya melihat halusinasi yang ini.

Yang kedua, problem nyata kita yang di depan mata ini, sebesar 850 ribu barel per hari kita impor BBM dari Singapura. Bayangkan Singapura negara sekecil itu bisa mengekspor BBM olahan ke kita, hampir setengah dari kebutuhan kita, wah nilai tambah yang dia peroleh sebesar apa. Sementara kilang kita meledak lagi, meledak lagi. Saya *nggak* tau ini laporan Pertamina RDMP di Balikpapan dengan target dari 200 menjadi 300 ribu, dengan kasus CDU IV-nya terbakar itu, waduh tercapai atau enggak itu, saya belum tau pastinya itu. Karena persis di unit yang sama yang terbakar.

Jadi ini persoalan berat bagaimana APBN kita akan semakin tertekan oleh impor. Langkah-langkah bagaimana ini supaya ruang fiskal kita *nggak* boros dari impor migas ini. Ini yang harus kita perhatikan betul, sehingga kebijakannya betul-betul nembak ke sasaran.

Yang kedua, terkait gas LPG 3 kilogram. Berkali-kali kita menemukan penyimpangan-penyimpangan, pengoplosan, dan terakhir adalah kasus di SPBE. Biasa di tingkat agen, di tingkat pangkalan, atau di tingkat pembeli ya yang apa, melakukan penyimpangan-penyimpangan, sekarang kita temukan di tingkat SPBE. Saya berpikir, apalagi setelah saya baca Keputusan Menteri tahun 2024 ya terkait ini, bahwa Menteri ESDM memberikan penugasan kepada Pertamina dengan cara penunjukan langsung tanpa lelang, untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas melon 3 kilogram. Tunjuk langsung tanpa lelang, okelah kita maklum itu BUMN.

Yang kedua, fungsi pengawasannya dibebankan juga kepada Pertamina. Jadi menyediakan, mendistribusikan, dan mengawasi. *Kan* jeruk makan jeruk. *fatsun good governance*, lembaga pengawasan tuh terpisah dengan lembaga pelaksanaan. Antara *doers* dengan pengawas selalu kita pisahkan, itu adalah *good governance check and balances*. Secara kelembagaan selalu itu kita arahkan. Karenanya saya minta, mohon

dipertimbangkan *udah lah* fungsi pengawasan LPG 3 kilogram diserahkan saja kepada BPH Migas. Selama ini kan BPH Migas mengurus pengawasan BBM, ya *udah* tambah aja daripada dikasih Pertamina juga di situ.

Nah, ini mungkin bisa lebih memperbaiki kinerja agar pengawasannya lebih meningkat ya, sehingga pelayanan pada masyarakat semakin bagus, akibatnya impor bisa kita tekan kalau kebutuhan dalam negeri kita bisa tekan. Saya rasa itu hal-hal yang mengarah bagaimana agar APBN kita semakin apa, ruang fiskalnya ya tidak tertekan ya dari sektor migas ini.

Demikian dari kami Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Pak Mul menekankan tentang di hulu ya, bagaimana kinerja di hulu dengan target-target yang selalu memang ada *natural, natural decline* yang terus-menerus turun, sementara konsumsi terus naik. Membandingkan bagaimana Singapura, memang betul Singapura itu kapasitas *refinery*-nya 2,5 juta ton, konsumsi dalam negerinya hari ini baru 800.000, jadi dia punya kurang lebih 1,7 juta ton yang bisa dipasarkan di dunia.

Beda dengan kita, kapasitas terpasang *refinery* kita baru 1 juta 30 ribu barel *per day* tetapi realisasinya hanya 800 ribu. Jadi betul Pak Mul menekankan tadi, impor kita memang 800an ribu barel *per day*, tetapi tidak semuanya dari Singapura, Pak. Dari Singapura tuh yang berupa produk, sementara yang *crude* adalah dari Timur Tengah, dari sumber-sumber lain.

Jadi memang ini keprihatinan kita bersama. Kita harus terus memacu karena memang migas masih menjadi urat nadi ekonomi kita yang luar biasa, baik di APBN kita yang tadi ada *lifting*, ada ICP, ada juga harga dikaitkan dengan harga dolar dan sebagainya, dan ini membutuhkan kecermatan kita bersama, sehingga tidak, kalau istilah Pak Mul jangan sampai di APBN kita menjadi tertekan lagi nih gara-gara persoalan-persoalan asumsi dasar yang asumsi makro kita.

Baiklah, oh ya tadi sudah terlanjur saya menunjuk duluan dari Golkar, terus habis itu putaran kedua dilanjutkan nanti PDI ini ada dua, ada Bu Mercy sama Pak Willy Midel.

Dipersilakan Pak Bambang Pati, Bambang Pasti Jaya ya.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Amin. Baik,



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi VII, kemudian
Yang kami hormati, Plt. Dirjen Migas beserta jajarannya, ada Pak Mirza juga.

Kira-kira begini Pak Plt. Dirjen, saya dengar tadi, masuknya saya agak terlambat ya, tapi dari tadi kawan-kawan marah-marah terus. Saya kadang-kadang berpikir ini kasihan jadi Pak, Pak Dadan sebagai Plt. Dirjen Migas. Ini *kan* dua jabatan, Sekjen, Sekjen ESDM, kemudian juga sebagai Plt. Dirjen Migas. Jabatan dua, gajinya satu Pak ya, tapi dimarahin, dimarahin.

Kenapa demikian situasinya? Karena ini terkait dengan kegalauan kawan-kawan Komisi VII. Galauanya kenapa? Karena Kami merasa harus bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Nah cuma saya memang, tadi saya lihat-lihat tentang *rundown* rapat pada hari ini, kenapa dipisah antara Dirjen Migas dengan apa, Pertamina dan SKK? Harusnya bareng, *kan* seperti itu.

Nah, ada beberapa hal saya pikir ya. Pertama, kalau ketika berbicara tentang bagaimana *lifting* minyak dan sebagainya, sebenarnya urusan ini kepada, kita berkeluh kesah kepada Dirjen Migas, kurang tepat juga karena sudah dikasih tugasnya kepada SKK. Saya ini juga bingung dengan tugas Dirjen Migas pada saat ini, ini saya pikir-pikir, saya renung-renung tadi, lebih kepada penyusunan program saja, ya *kan*. Terkait dengan tugas di hulunya, diberikan kepada SKK. Terkait dengan kepada penugasan pengawasan distribusinya, diberikan kepada BPH. Yang mendapat penugasan distribusi apa namanya, PSO-nya, Pertamina. Jadi posisi Dirjen Migas ini ya mungkin hanya terkait dengan rekomendasi impor, impor BBM mungkin, lebih kepada persoalan-persoalan seperti itu.

Tetapi poinnya seperti ini, Pak, Pak Dirjen. Kegagalan ini disampaikan oleh kawan-kawan karena situasi-situasi yang di luar kontrol kita. Pertama, ICP kita sekarang sudah terlampaui dari apa yang ada di dalam APBN 2024 ini. Kurs juga sudah melampaui, begitu Pak Ketua ya. *Lifting* tidak tercapai. Tiga hal ini, tiga hal ini tentu berpengaruh langsung kepada kesehatan daripada APBN kita, ya *kan*. ICP *nggak* sesuai, lebih tinggi, *lifting*-nya tidak tercapai, kursnya lebih tinggi, berat Pak bebannya Pak, maka kegagalan ini muncul. Nah, jadi saya pikir kita *troubleshooting*-nya apa sih kawan-kawan? *Kan* seperti itu.

Terkait dengan *lifting* minyak ya, ini ada dua *kan* yang terkait langsung kepada, kepada operasional dan APBN-nya. Pertama, terkait dengan pihak-pihak yang diberikan mandat untuk melakukan *lifting*, yaitu K3S, ada Pertamina dan sebagainya dan kawan-kawan. Nah, ini saya pikir jika memang diperlukan, Ketua ya *kan*, ya kita bentuk kata ibu Mercy tadi, Panja K3S, satu. Yang kedua, yang kedua, biar nanti Ibu Mercy lah yang menjelaskan itu, tentang itu.



Yang kedua, terkait dengan bagaimana kita juga harus memperhatikan kesehatan daripada APBN kita. Kita ada yang namanya *cost recovery* itu. Kita ini tidak pernah tau apa yang ada di dalam *cost recovery*. Tiap tahun secara gelondongan kita diketok saja, begitu Ketua ya. Ketok saja usulannya seperti apa dari Kementerian Keuangan, kemudian SKK, saya *nggak* tau ini apakah Dirjen Migas juga di dalam *cost recovery* penentuannya dilibatkan, Pak? Tidak *kan*? Nah tapi itu berpengaruh langsung kepada persoalan pembiayaan negara.

Nah, kita ingin bahwa *cost recovery* ini dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, *output* itu sesuai. Nah oleh karena itu Pimpinan, kami mengusulkan ya, ini *cost recovery* ini juga harus kita ulas, jangan ini menjadi barang suci. Jadi seolah-olah hanya pihak-pihak tertentu saja yang urusan ini, kita *nggak* tau, kita ini secara gelondongan *loh* setiap pengusulan itu, "setuju?", disuruh ukur, ketok, selesai, tapi *nggak* tau barangnya apa.

Kami mengusulkan lebih baik ini dibuka saja terang benderang, kenapa? K3S yang menikmati daripada *cost recovery* itu tidak memberikan manfaat kepada *lifting*, padahal mereka menagih biayanya kepada negara, begitu Pimpinan ya. Nah saya pikir juga Pak Dirjen, ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa harus ada ke transparansi dan apa namanya, kejelasan dalam penggunaan anggaran tersebut, ya.

Saya pikir itu perlu menjadi perhatian kita, saya pikir ini lebih, lebih teknis, ya. Memang tadi saya mendengar kawan-kawan marah-marah, karena kenapa, *kesel*. Ini kita ada tanggung jawab, tadi Pak Ramson bilang ini persoalan marwah kita. Bagaimana Komisi VII ya, di dalam asumsi-asumsi makro APBN, kita berperan langsung dalam kurs, oke kurs bukan di kita, tapi *lifting*, kemudian juga ICP, kita yang menentukan. Di mana tanggung jawab kita? *Kan* seperti itu.

Nah, itu saya pikir yang terkait dengan persoalan aktual pada saat ini, kami mendorong kepada forum ini untuk mengevaluasi ide yang saya sampaikan itu secara, secara lebih serius. Jadi kami di sini bukan datang memarah-marahi Pak Dirjen dan jajarannya, engga Pak. Sebetulnya lebih, setelah ini tolong diberikan kira-kira masukan kepada kami juga terkait dengan yang namanya *cost recovery* K3S ini ya, ini *gimana* ini? Ini *kan* negara sudah mendistribusikan tanggung jawab yang dulunya semua mungkin ada di Dirjen Migas, ini soal hulunya kepada SKK. SKK juga harus kita panggil nanti, minta kejelasan, ini *gimana* mereka mengorkestra, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap, pertama mengorkestra K3S, bagaimana bertanggung jawab terhadap apa namanya, *performance* daripada *lifting* minyak tersebut, dan kemudian penggunaan *cost recovery*.

Kami sekali lagi perlu masukkannya dari Pak Dirjen. Jadi Pak Dirjen harap dimaklumi kalau kawan-kawan agak emosi itu ya seperti itu, ya. Karena tanggung jawab moral daripada kawan-kawan terhadap situasi seperti ini. Jadi kalau Pak Hendrik ini, beliau ini galau, karena kenapa? Ya tanggung jawab moral. Begitu Pak Hendrik ya? Itu satu.

Yang kedua, terkait dengan LPG 3 kilo, ini juga persoalan aktual. Saya tempo hari ketika Prof. Tutuka masih aktif ya, saya sempat *nyentil*. Jika Prof., saya bilang, jika persoalan pengawasan di bidang hilir gas LPG kepada masyarakat ini ada kesulitan, ya *kan*, kalau memang dirasakan ribet dan Dirjen Migas merasa lebih fokus kepada penyusunan program dan sebagainya, kasih aja ke BPH Migas. BPH Migas juga jangan *nanggung-nanggung*, jangan urusannya BBM, tetapi jargas dia *ngurus*, ya *kan*, jargas dia *ngurus*, tapi gas LPG 3 kilo *nggak* ngurus *gitu loh*. Kita jadi, jadi bingung di lapangan.

Nah, tapi kalau jika Dirjen Migas punya program yang jelas tentang bagaimana pengawasan apa, untuk LPG 3 kilo, saya pikir enggak ada masalah juga. Kuota *kan* sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Saya selalu ingat ya, bahwa proses daripada pengumpulan data ini berjenjang dari bawah, naik dari kabupaten, provinsi, provinsi bawa ke Dirjen Migas, lalu di agregasi, lalu angkanya didorong ke Komisi VII, lalu kita bahas di sini secara gelondongan. Ketika di gelondongan di sini putus, nanti di Banggar gelondongan lagi. Lalu penyesuaiannya nanti tergantung daripada Dirjen Migas lagi, kuotanya berapa. Engga ada yang sinkron, makanya kita bingung ini.

Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang digitalisasi, jika kemudian sesuatu yang menjadi input data awal tidak merupakan dasar untuk pendistribusian, *gimana? Kan* bingung. Saya baca di sini *kan* mendorong digitalisasi proses bisnis, salah satunya tentu pada pembagian apa, kartu dan sebagainya pada pembagian LPG 3 kilo, tapi datanya *kan* beda sudah. Karena kenapa, jumlahnya, penyesuaiannya pakai gelondongan, naik dan turun, *kan* seperti itu. Bagus kalau dia naik, kalau dia turun? Pening kepala kita, penyesuaiannya seperti itu, sementara kebutuhan masyarakat tetap, malah meningkat.

Nah itu, ini persoalan-persoalan teknis yang saya pikir sering disampaikan oleh kawan-kawan, tetapi tidak pernah dijawab secara jelas, secara teknis. Jadi kita pakai wacana terus nih, *dibiarin* aja, *biarin* aja penyesuaiannya seperti itu. Nah apa *grand design*, bukan *grand design* ya, apa solusi yang tepat sebetulnya? Jadi saya pikir apakah kesalahannya memang sejak dari penganggaran? Kalau penganggarnya tidak gelondongan artinya tepat sesuai dengan data, ya *udah* berarti harusnya *kan* pendistribusiannya berdasarkan itu juga. Tapi ketika penganggarnya tidak pakai data, pendekatannya pendekatan apa, hanya anggaran yang tersedia, ya repot kita, *nggak* akan pernah sinkron *gitu*.

Nah kemudian yang terakhir nih, yang ketiga tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kalau saya tidak salah, ini peran daripada Dirjen Migas apa ya di dalam penentuan HGBT ini? Menentukan sektornya juga atau harganya saja? Harganya saja? Harga dan alokasi, tetapi kepada sektor bidang mana itu bukan di sini? Oh, ya oke.

Lalu bagaimana pengawasan terhadap HGBT itu diberikan, dampaknya kepada ekonomi bukan juga di sini? Kenapa? Di sini juga? Boleh interaktif, izin Pimpinan.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Ya, tidak hanya di ESDM kalau itu, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perindustrian.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Oh ya, oke. Kalau begitu, mungkin forumnya saya *pass* saja kalau begitu, karena apa namanya, bukan bagian penentu seperti itu.

Oke saya pikir demikian, Ibu Mercy mohon maaf agak panjang sedikit, saya janjinya cuma sebentar. Tetapi, saya menyampaikan itu untuk mengingatkan kawan-kawan, jangan marahnya ke Pak Dadan *gitu*.

Baik, demikian Pimpinan. Atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Pak Bambang Pasti Jaya dari Golkar, *gitu*.

Jadi iya tadi diuraikan beberapa hal menyangkut tentang, memang selama ini Pak Dadan, Pak Dirjen, dan segenap jajaran, bahwa kita ini bangga lah PNBPN naik, pajak naik di migas, bahkan secara proporsi kita dari PNBPN nasional kita mencapai 80% lebih.

Memang isu *cost recovery* hari-hari ini kan hilang. Setelah dulu awal-awal ramai, lantas dijawab dengan “kalau *gitu* PSC *cost recovery* ditawarkan dengan lain dan *gross split*”. Memang *gross split* isu *cost recovery* jadi hilang ya memang. Tetapi itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa hari ini *cost recovery* kita nih berapa, untuk siapa, untuk kepentingan apa, kita praktis tidak tau persis sebagaimana disampaikan tadi.

Jadi penting ini Pak Dadan, mungkin salah satu tadi solusi yang diusulkan adalah kita bentuk Panja *Cost Recovery*, agar apa? Ya tadi antara *in* dan *out* dari *budget* itu betul-betul tepat sasaran dan ada nilai tambah yang memang, dan seterusnya. Jadi itu, terima kasih Pak Bambang, nanti mungkin kita bahas secara internal di Komisi VII apa perlu dibentuk apa, Panja *Cost Recovery*. Bukan untuk apa-apa ini, supaya lagi-lagi pemanfaatan keuangan negara tepat sasaran, tepat guna, dan optimal.

Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Eddy, dilanjutkan dari PDI Perjuangan Pak, eh Ibu Mercy Barends. Pak Eddy dipersilakan.



(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

**SEMULA: (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/
KETUA KOMISI VII DPR RI
MENJADI: H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI**

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Pak Eddy dan seluruh kawan-kawan,
Rekan-rekan Komisi VII,
Pak Plt. Dirjen Migas merangkap Sekjen, dengan
Seluruh jajaran yang berkenan hadir hari ini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang bagi kita sekalian.

Saya langsung aja pada poin pertama, yaitu perkembangan penerimaan negara PNBP SDA migas. Saya minta di-*compare* Pak, antara halaman 4 dengan halaman 9. Siapa yang membuat tabel ini? Rasa-rasanya amat sangat-sangat-sangat tidak realistis. Untuk target tahun 2024 itu warnanya biru, realisasi terhitung per Maret 2024. Untuk *lifting* minyak 567,65 dan untuk *lifting* gas itu 885,46, artinya sudah tinggal sepertiga lagi memenuhi target yang kita harapkan, sementara pada statistik batang yang ditampilkan pada halaman 4, PNBP-nya baru 36,81%, hanya sepertiga dan ini sangat tidak realistis.

Jadi kalau kita hitung benar dengan 36,81, kalau di-*compare* dengan data di halaman 9, ini sangat tidak benar Pak. Ini kita bukan anak TK, saya minta maaf ini, ini barang sederhana mohon kalau bisa *dibenerin* Pak. Ini benar-benar ya. Dengan demikian, tertinggal, ini karena bulan Maret ya, bulan Maret kita sudah mencapai 567, benar Pak? Maka *mestinya* tiga kuartal yang lain melewati angka 635, ini rumus dasar Pak, kalau dia *flat* 567.

Saya *nggak* tau ini data yang salah atau kebetulan K3S lagi rajin di semester pertama atau bagaimana ini, sehingga antara data yang ditampilkan dengan angka perolehan PNBP ini hasilnya sedemikian, ini mohon mungkin bisa diklarifikasi karena sudah mencapai 189,4% dan 185,7%, sementara data PNBP 36,81%. Artinya kalau ada pendapatan yang lain-lain, saya kira itu *supporting system* dengan data besaran yang dari sisi produksi dan lain sebagainya, itu yang pertama Pak.

Yang kedua, pada asumsi makro 2024-2029 halaman 5. Kemarin saya juga menyampaikan kepada Dirut Pertamina, bahwa apa yang kita susun sekarang ini, ada dalam masa transisi tiga bulan saja, yaitu dari bulan Oktober ke bulan Januari. Karena ini tahun terakhir RPJM yang berakhir di tahun 2024. Presiden terpilih akan dilantik pada bulan Oktober. Tiga bulan kemudian di



bulan Januari akan menyampaikan RPJM yang baru. Dari RPJM itu turunlah yang disebut dengan RKP, rencana kerja pemerintah yang didistribusi kepada seluruh kementerian/badan dan seterusnya.

Betul bahwa setiap tahun, ini menjadi tanggung jawab rutin kita setiap tahun, tapi kami juga patut memastikan bahwa tidak akan lagi terjadi perubahan yang sangat-sangat fundamental jika Presiden *elect* yang baru itu kemudian mengeluarkan kebijakan yang baru dan berbeda pula, seperti itu. Jadi saya kira mungkin ini menjadi perhatian bagi kita semua sehingga untuk asumsi makro itu sendiri, saya kira ini menjadi catatan bagi kita sekalian dalam penetapannya.

Angka untuk *lifting* minyak mentah sebesar 597, turun setiap tahun. Saya kira teman-teman semua telah memberikan catatan yang sangat luar biasa, sementara angka *cost recovery* naik terus Pak, ini kan tidak realistis. Dan kalau di tahun ini kami yang ke Banggar berhadapan lagi dengan Pimpinan dan forum Banggar yang mulia nanti dan kita harus meng-*adjustment* segala macam, kami minta mungkin ada evaluasi menyeluruh terhadap K3S.

Kemarin dengan Pertamina, Pertamina memberikan pandangan yang sangat optimis, walaupun dari sisi hulunya mulai dari *reserve-to-production*, *flat* Pak, hanya tujuh tahun. Jadi kalau kementerian, *c.q.* Dirjen Migas tidak melakukan *extraordinary effort*, tujuh tahun kemudian habis seluruh BBM minyak kita sampai tahun 2031. Sementara blok-blok baru yang lain, kita menanti terutama yang sifatnya *big fish* blok dan seterusnya.

Kami ingin dapat gambaran Pak, di halaman yang berkaitan dengan, halaman 11 terhadap empat strategi utama peningkatan produksi *lifting* minyak dan gas, ada empat hal utama yang telah dipaparkan, *improving existing asset value*. Bagaimana *improve*-nya, Pak? Kalau kita menganggap bahwa aset migas kita yang ada di Pertamina atau yang lainnya itu menjadi *prime mover* untuk peningkatan *lifting* migas, sementara dari sisi pemeliharaan dan lain-lain, terbakar, terbakar, terbakar terus-menerus. Kami ingin mendapat gambaran menyeluruh, tidak saja berkaitan dengan sistem *existing* pipanisasinya, termasuk sumurnya, termasuk EOR, dan seterusnya sehingga kita bisa dapat gambaran *clear*.

Kalau kita rapat setiap tahun model kayak *gini*, paparan dari Kementerian nanti tinggal datang, oh tahun ini kita turun lagi, hari ini kita 597, tahun depan mungkin 580, kita terima seperti *taken for granted*. Tidak ada upaya bersama dari kita baik dari pihak Kementerian maupun Komisi VII, apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan *lifting* minyak terutama.

Yang berikut Pak, ini masih berkaitan dengan empat strategi utama. Untuk EOR dan *waterflood*, kemarin itu paparan dari Pertamina, bahwa tambahan 680 sumur adalah sumur baru ditambah dengan sumur-sumur yang ada, kemudian ditingkatkan apa, kualitas produksinya. Untuk tahun 2025, kemarin tidak disampaikan oleh Ibu apa namanya, Dirut Pertamina. Kami juga ingin dapat gambaran sejauh mana kebijakan dari pemerintah untuk memastikan EOR dan *waterflood* kalau kita belum punya *big fish* yang lain dari sisi *reserve-to-production*.



Ini kita *nggak* bisa main-main ini. Kalau kita banting setir, deklinasinya, *natural decline*-nya itu turun terus-menerus terus-menerus, sementara ke *green energy*-nya juga belum ada gambaran, maka satu-satunya cara hari ini yang bisa kita lakukan untuk memastikan adalah EOR, *waterflood* kita tingkatkan sekuat-kuatnya, bagaimana bentuknya saya *nggak* tahu.

Yang berikut Bapak-Ibu sekalian, ini berkaitan dengan urusan gas bumi. Untuk yang urusan gas bumi, target untuk 2025 naik selisihnya cuma tiga poin dari 1.033 ke 1.036, mengapa Pak? Kita kelebihan gas sesungguhnya. Apa, apa yang mau, apa yang membuat sehingga selisihnya cuman tiga persen? Kalau yang lain-lain ini selisihnya masih cukup bagus ya, rata-rata naik persentasenya. Dari 2024 ke 2025 ini yang mungkin paling terkecil dalam sejarah 2020 ke 2025 peningkatannya, dan buat saya amat sangat tidak realistis, amat tidak realistis.

Kami minta kalau bisa ini ditinjau lagi, kemudian dievaluasi ulang lagi dan memastikan bahwa, sementara waktu kita bahas dengan industri-industri Pak, kebutuhan mereka untuk gas amat sangat banyak, bahkan beberapa tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari sisi kebutuhan gas untuk industri, entah pupuk, entah industri lain-lain, sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian kalau *nggak* salah waktu itu. Jadi kita minta mungkin ada proyeksi yang optimis Pak. Ini sepertinya proyeksi yang sudah terlalu konservatif, tidak ada *effort* sama sekali untuk memastikan dari sisi *lifting* gas. Ini yang berkaitan dengan catatan untuk gas bumi.

Yang berikut, ini berkaitan dengan subsidi LPG tepat sasaran. Saya lebih berharap Pak, untuk catatan subsidi apa namanya, kebijakan subsidi energi, jangan cuman LPG Pak. LPG ada di kawasan barat dan kawasan tengah, kami yang Indonesia Timur sebagian besar subsidinya tuh masih minyak tanah, masih apa, solar dan lainnya. Jadi catatan-catatan itu masuk juga, karena kita punya cukup banyak catatan dari wilayah timur yang tidak masuk di sini. Mungkin sebagian besar kawan-kawan yang datang sejak dari kemarin, ribut besar soal LPG 3 kilogram di lapangan, sementara kami yang di Indonesia Timur, ya persoalan mendasar kita masih di soal minyak tanah, solar, dan lain-lain. Kami meminta pertimbangan Pak, untuk ini mungkin dipijaki di tingkat pemerintah karena sebagai pembuat regulasi dengan Pertamina dan BPH Migas.

Yang pertama ini soal jalur distribusinya, Pak. Pengalaman kami, untuk keputusan dari Kementerian KKP, khusus untuk kapal-kapal di bawah 30 GT itu bisa mendapatkan minyak subsidi. Kapal 30 GT saja masuk, tutup semua itu kapal-kapal kecil. Banyak sekali kapal-kapal 30 GT, apa yang terjadi? Belum tentu mereka pakai itu minyak, terjadi jual lagi di atas laut ke kapal-kapal di atas 100 GT yang jumlahnya hari ini 2.100 kapal eks cantrang beroperasi di Lautan Arafura dan Lautan Seram. 1.900 kapal ada di Lautan Arafura, dan sisanya hampir 400 kapal itu di WPP Lautan Seram dan sekitarnya.

Mereka dapat minyak itu dari mana Pak? Sementara petani dan nelayan kecil yang ada di Maluku *nggak* lihat solar sama sekali, ini saya sampai agak, dari kemarin saya menyampaikan ini kepada pihak Pertamina. Pertamina cuci



tangan Pak, karena buat mereka, begitu mereka stok apa namanya, kuotanya, itu hanya sampai di SPBU, SPBG kalau itu gas. Turun ke bawah, retail ecerannya itu sudah bukan urusan mereka. Jadi kita larinya ke mana Pak? Padahal kalau kita membawa persoalan kita di meja sidang, di tingkat, di tingkat nasional, di tingkat DPR hari ini, mestinya masalah terselesaikan karena kita bernegara Pak. Kalau mulai dari tingkat desa sampai provinsi sudah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kita harus cari solusi di mana solusinya. Mau pakai terbuka, mau pakai tertutup penyalurannya, buat saya sudah tidak lagi menjadi persoalan. Persoalannya hari ini bagaimana bentuk pengawasannya, sistem apa yang dipakai, efek jera seperti bagaimana.

Tahun, dua tahun lalu apa tahun lalu, kedatangan hampir ratusan ton kedatangan BBM di atas kapal di lautan di sekitar Pulau Buru dan sekitarnya, Seram Timur, Buru, dan sekitarnya. Masa *kan* Pertamina di daerah tidak tau, angkatan laut tidak tau, satpol air tidak tau, dan ini BBM yang jumlahnya sangat banyak.

Jadi kami sangat berharap, khusus untuk masalah subsidi LPG, lain kali nanti kalau bikin dokumen, tambahkan juga subsidi juga untuk solar dan lain-lain karena Indonesia Timur *kita* nggak bahas LPG Pak, kita juga punya banyak masalah berkaitan dengan subsidi yang berkaitan dengan minyak tanah, solar, Peralite, dan seterusnya.

Saya kira itu beberapa catatan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan gumulan kita hari ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Ibu Mercy atas masukannya.

Nanti saya kira Ibu-Bapak Anggota Komisi VII, masalah mengenai *cost recovery* bisa kita perdalam lagi dalam pembahasan nanti jam dua bersama teman-teman dari SKK Migas.

Selanjutnya, silakan Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati, dan
Seluruh Anggota, dan juga
Plt. Dirjen Migas dan seluruh jajarannya,



Jujur saja, apa yang telah disampaikan teman-teman kayaknya sangat lengkap sehingga saya juga terkejut ya, apa yang disampaikan Ibu Mercy tadi, tensinya agak tinggi kemudian gasnya sedikit *full*, ya saya rasa sesama dari Fraksi PDI Perjuangan, saya juga sangat memberikan dukungan apa yang telah disampaikan oleh Bu Mercy tadi ya, bahwa itu menjadi perhatian dari, dari migas, dari Dirjen Migas ya.

Dan yang ingin saya sampaikan saat ini, ya karena hal-hal yang teknis saya rasa sudah dikemukakan. Saya *tuh* mau bertanya ini Pak Plt. Dirjen, itu kalau jaringan gas untuk Ibu Kota Negara, itu kayaknya belum pernah dibincangkan di apanya, di Komisi VII *gitu*. Sementara kita tau bahwa jaringan gas di sana, apalagi dia adalah ibu kota dan tentu sudah harus disampaikan karena dari PLN saya melihat sudah, sudah pernah disampaikan, nah kemudian untuk jaringan gas itu bagaimana nantinya di, di sana.

Nah, jadi dengan sudah terpasangnya atau terencananya pemasangan jaringan gas yang ada di Semarang, Cirebon, dan lain-lain ini saya melihat bahwa kedepannya itu karena bagaimanapun tuntutan dari kecanggihan kehidupan manusia ini tidak lepas, saya pikir kita juga ingin melihat *blueprint* pembangunan jaringan gas ini yang rencananya dipasang di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini.

Nah maka untuk itu, kalau saya melihat perlu adanya sesuatu rencana jangka panjang ya dengan anggaran yang dipersiapkan agar kedepannya kita berharap ya, karena ada Kota Tarakan itu saya pernah lihat *kan* di sana sudah ada jaringan gas rumah tangga dan sebagainya. Nah sementara kota-kota besar yang ada di Indonesia ini apalagi ibu kota provinsi menurut saya itu *udah* wajib *gitu*, menjadi satu prioritas oleh Pak Dirjen bersama dengan apa namanya, ya mungkin perusahaan-perusahaan yang bisa kita arahkan mereka untuk membangun jaringan gas ini, tidak harus dengan biaya negara *gitu* ya. Kalau saya lihat biaya negara kan keleleran kita APBN-nya, tetapi jika ini juga diberikan kepada swasta, kepada swasta kerja sama, ini juga percepatan *gitu*, agar kehidupan ini lebih, lebih layak.

Yang terakhir, yang tepat sasaran ini sudah sering dibincangkan Pak Dirjen ya, kayaknya kita ini sudah tidak ada bahan lagi *gitu* ya untuk membahas tentang tepat sasaran, ya kenapa? Ya sebenarnya kalau kita melihatnya itu adalah suatu komitmen saja, karena sudah ada organisasi kita di Republik ini yang untuk mengawasinya *gitu*, bahkan sistem pun saat ini sudah ada *gitu*, tetapi selalu tidak tepat sasaran.

Menurut saya Pak Dirjen, ini orangnya. Ya jadi orangnya yang harus kita putar *gitu*, putar yang artinya yang kepalanya di bawah kita taruh ke atas *gitu*, jadi supaya betul-betul negara ini diurus oleh orang yang tepat *gitu*, supaya kita *nggak* capek. Ya sebenarnya supaya *nggak* capek, keputusannya itu adalah tidak ada subsidi, beres ya. Jadi kita *nggak* capek-capek biaya ya. Kita lihat subsidi itu anggaran untuk mengawasinya itu coba dikeluarkan oleh negara berapa itu biaya untuk pengawasannya ya. Saya melihat cukup jelimet itu ya, di SPBU maupun di SPBE, apalagi kan kita baru dengar kemarin ya, sidak dari

Menteri Perdagangan itu menemui bagaimana itu gas 3 kilogram yang artinya kurang takaran *gitu*, banyak sebenarnya Pak Dirjen.

Maka oleh karena itu, masukkan saya memang harus ada satu komitmen, ya. Karena aturan sudah ada, sistem sudah ada, tapi komitmennya yang artinya sering di, dimanfaatkan ya.

Mungkin itu sebagai masukan saja dari saya, terima kasih dan saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Willy.

Saya kira tidak ada pertanyaan lagi dan saya mohon izin kepada Anggota untuk bisa mengajukan pertanyaan terakhir kepada Pak Dirjen dan Ibu-Bapak dari kementerian, Kementerian ESDM.

Pertama Pak Dirjen, ini saya mohon, kita kan punya target Pak bahwa kita akan mencapai *lifting* satu juta barel per hari di tahun 2030 dan 12 *billion* apa, *cubic feet per day* untuk gas di tahun yang sama. Nah kalau kita lihat di halaman 5 ini, 2029 saja kita menargetkan antara 642 sampai 792 apa, ribu barel per hari minyak mentah. Jadi saya kira perlu direvisi Pak, karena *nggak* mungkin loncatan itu dalam satu tahun itu akan fenomenal seperti itu.

Jadi saya kira kita apa, menyampaikan angka yang sudah realistis saja, jangan sampai nanti setiap kali nanti Bapak-Bapak datang, nanti teman-teman dari SKK datang, akan dikejar oleh teman-teman di Komisi VII mengenai hal ini. Terkait capaian dan target, yang mana capaian itu tidak realistis untuk mengejar target yang sudah ditetapkan tahun 2030. Saya kira Itu poin penting bagi saya untuk kedepannya.

Sama seperti ini Pak, sama seperti permasalahan di sektor energi terbarukan. *Kan* kita sudah sepakat, 23% bauran energi terbarukan di tahun 2025, sekarang itu masih sekitar 12-13% sehingga akhirnya diturunkan realistis menjadi 17%. Jadi saya kira kita telan saja pil realita itu, agar kedepannya kita betul-betul membahas sesuatu yang aktual. Itu yang pertama, Pak.

Kedua Pak, mengenai pengendalian terhadap LPG 3 kilogram. Tadi disampaikan di halaman 18, bahwa akan, sedang dilaksanakan melanjutkan upaya transformasi subsidi. Jadi subsidi tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat. Nah mohon dijelaskan juga Pak, progresnya sampai saat ini bagaimana dan kapan kira-kira kita berharap bahwa proses ini sudah akan tuntas sehingga pemberian subsidi berbasis penerima manfaat itu sudah dilaksanakan secara penuh, itu Pak.

Dan ketiga Pak, mohon *update* Pak, ini kita sudah dua tahun kita di sini menyuarakan dan mempertanyakan bagaimana progres daripada perpres, revisi Perpres 191, itu. Dan ini masih menjadi tanda tanya besar bagi kita, kok



dua tahun ini masih belum selesai. Jadi saya kira itu Pak, tiga pertanyaan singkat dari kami, dan karena tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, kami persilakan Pak Dirjen untuk bisa memberikan tanggapan dan jawaban, silakan Pak.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Ibu-Bapak atas masukan atas kontribusinya.

Mungkin kami tidak akan menyampaikan secara, di catatan kami cukup panjang Pak, di sini jadi.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya kira ringkas saja Pak, nanti yang lain bisa tertulis.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Akan kami kelompokkan berdasarkan subjek gitu ya, Pak. Yang paling banyak ditanya itu kan *lifting* satu juta pasti tidak tercapai, kira-kira seperti itu, barangkali nanti pun akan disampaikan oleh SKK yang satu juta BOPD dan 12 Bcf tersebut.

Kami memang yang, saya memegang data dari SKK, Pak Ketua. Bahwa betul kalau target 2030 untuk satu juta ini sekarang tidak keluar angkanya *gitu* ya, mundur, mundur pasca 2030. Jadi kalau data yang kami yakini sekarang, untuk proyeksi *lifting* migas nasional itu kira-kira kita berada di angka 869, *gitu* Pak, 869.000, tidak, tidak *nyampe* itu ke angka satu jutanya, untuk hal tersebut. Itu untuk yang migas, untuk di 2030.

Kemudian untuk yang gasnya Pak, yang gasnya ini proyeksi terbaik dari sektor ini adalah berada di angka 10.000 Pak, 10.440, itu, itu skenario tingginya. Angka tengahnya itu di angka 9.663, sehingga angka 12 nya itu terkoreksi menjadi sekitar berapa, 10 per 12 nya *gitu*, Pak Pimpinan. Jadi ini merespon untuk seluruh pertanyaan yang terkait dengan target 1 juta BOPD.

Kemudian kalau untuk yang terkait dengan tahun, target tahun depan di angka 597, tentunya kami juga semuanya berdasarkan dari data-data empiris yang kita punya untuk 2024 plus proyeksi yang ada untuk 2025. Ada angka-angka yang per KKKS yang kami lakukan perhitungan, dan ini angkanya memang menuju ke angka 597 untuk di 2025. Itu Pak yang, yang kenapa secara angka sekarang berada di angka tersebut, yang dandangan kami ini adalah angka yang realistis per data yang kita punya saat ini. Itu untuk yang, untuk yang target di 2025.

Kemudian kenapa PNBP 2023 turun, *kan* banyak. Kita juga kalau, kalau *ngelihat* di data yang produksi, itu 2022, 2023, tidak berbeda jauh. *Lifting* kita tidak beda jauh antara 2022, 2023. Jadi kira-kira kalau, nah ini *kan* ada angkanya ini Pak. 2022 *lifting*-nya *kan* 612.000, 2023 turun, tapi *kan* angkanya di 205. Kemudian untuk yang gas pun demikian, malah gas itu naik. Jadi kira, kalau karena PNBP itu fungsi dari volume dan harga, *kan* hanya dua itu saja, regulasi, yang lainnya *kan* sama. Jadi ya harganya berbeda antara 2023 dan 2022.

ICP 2022 itu 97. ICP 2023 itu 78, nah kira-kira barangkali ya, karena hanya itu saja yang beda, yang lainnya *kan* sama. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk yang PNBP.

Kemudian untuk yang terkait dengan HGBT, tadi banyak pertanyaan tentang HGBT. Memang ini sudah berjalan dan per regulasi 2024 itu, bukan terakhir, kalau dengan regulasi yang sekarang 2024 ini harus dievaluasi. Jadi kami sedang melakukan hal tersebut, tidak hanya ESDM yang melakukan evaluasi, karena ada dari Kementerian Keuangan, ada dari Kementerian Perindustrian, sudah ada masuk, masuk laporan dari Kementerian Keuangan, banyak masukan untuk hal tersebut *gitu* ya. Beberapa sangat baik bahwa, terbukti bahwa ini bagus, berjalan, tapi angka-angka yang lainnya tidak, ada berapa yang tidak, tidak sejalan dari sisi angka. Misalkan kalau untuk, untuk realisasi dari investasi misal. Nah ini, ini kami masih dalam hal tersebut untuk, untuk dilakukan evaluasi secara segera.

Kemudian memang tadi Pak Ketua juga menyampaikan, Pak, Pak Eddy, termasuk gas untuk industri yang sekarang *kan* ada sedikit terganggu dari sisi *supply* ya, sehingga gas yang disalurkan lewat pipa yang PGN itu sedikit banyak mengalami kekurangan ya, kekurangan, karena memang dari hulunya berkurang dan ini *udah* masuk di dalam kontrak, manajemen risikonya sudah masuk di situ, kalau terjadi kekurangan produksi bagaimana cara membaginya itu sudah ada. Tapi betul bahwa yang disampaikan oleh Pak Eddy tadi bahwa *supply* gasnya terjadi penurunan.

Kemudian untuk yang tadi Ibu Mercy sampaikan yang terkait dengan kenapa datanya tidak, seakan-akan tidak masuk akal untuk yang *lifting* dan dibandingkan dengan PNBP ya, tadi *kan* disampaikan. Sebetulnya ini, yang ini adalah BOPD Bu, jadi, jadi ini data ini data harian, kalau data sana data akumulasi. Jadi sama-sama benar dan memang kalau dilihat selintas sepertinya kok tidak sejalan, tapi ini adalah realisasi yang sifatnya harian, yang satunya lagi realisasinya tahunan. Jadi yang tahunan pasti angkanya baru di angka sepertiga-an, *gitu* ya.

Kemudian terkait dengan strategi untuk peningkatan *lifting*, baik itu minyak dan gas, terima kasih Pak Ramson juga tadi mengingatkan bahwa transisi energi tidak mungkin langsung ke energi bersih, dan kami pun, Pak Menteri pun sering menyampaikan bahwa transisi energi ini akan dilakukan sesuai namanya, transisi. Jadi kita akan bertahap, akan melewati gas, kemudian baru ke energi bersih terutama yang berbasis dengan EBT dan, dan per sekarang, dari data-data hulu yang kami terima, temuan-temuan itu banyak



terjadi di gas Pak, di gas, meskipun minyak juga terus kita dorong *gitu* ya, tapi memang sekarang optimismenya itu lebih tinggi ke gas dan menurut kami ini sesuai dengan zamannya *gitu*, bahwa kita memerlukan kondisi bahan bakar yang secara emisi ini jauh lebih turun dan gas itu berada di sana, sehingga transisinya memang akan dilakukan untuk hal tersebut.

Untuk LPG, untuk peningkatan kebutuhan LPG, bahwa usulan kami untuk yang di 2025 itu kan peningkatannya tidak, barangkali Ibu-Bapak bertanya, “*kan* pertumbuhannya 2% kok naiknya tidak 2%?” mungkin bahasa *direct*-nya seperti itu. Kami sekarang lagi melakukan transformasi, tadi Pimpinan juga bertanya sejauh mana prosesnya. Sekarang sudah 42 juta NIK sudah, sudah, sudah terdaftar Pak, sudah masuk *gitu* ya. Sebetulnya berapa targetnya? Kami pun tidak terlalu paham targetnya berapa, tapi yang menggunakan LPG itu *kan* kecuali yang tadi disampaikan oleh Ibu Mercy di wilayah timur, sehingga angkanya barangkali harusnya bisa sampai ke angka di atas 50 barangkali Pak, dia atas 50 juta NIK, di atas 50 juta rumah tangga *gitu* untuk hal tersebut. Jadi sekarang sedang melakukan hal tersebut.

Jadi ini bukan tidak mengakomodir pertumbuhan dari rumah tangga yang memerlukan LPG Pak, tapi kami akan mengurangi, memastikan bahwa ini tepat sasaran, sehingga yang tidak berhak tidak akan dapat. Nah selisih itu angkanya masih, masih ada Pak, masih cukup besar dan ini bisa ditunjukkan di angka 2024, kita berhasil, 2023 kita berhasil, 2024 kami, kami sekarang masih *on track* sesuai dengan yang APBN. Ini bukti bahwa transformasi untuk tepat sasarnya LPG 3 kilogram ini sudah mulai terlihat.

Kami, kami memastikan bahwa untuk yang rumah tangga yang seharusnya mendapat subsidi, pasti dapat *gitu*. Tapi barangkali nanti yang desil 8, 9, 10 *gitu* ya, itu *kan* harus kita sapu bersih, itu sudah, sudah tidak bisa lah mendapatkan, ini sedang diselesaikan, termasuk sedang menyelesaikan revisi dari Perpres tersebut.

Kemudian bahwa pengawasannya semakin ditingkatkan, kami tidak hanya memastikan pangkalan saja Pak Ramson, bahwa semuanya kami lakukan, pengawasannya di seluruh *supply chains* untuk yang LPG itu, bahwa sekarang ada pemberitaan yang terkait dengan sidaknya Pak Mendag, betul bahwa itu dilakukan seperti itu, bahwa di situ tidak 3 kilo memang, cara menghitungnya berbeda, Pak. Tiga kilo itu adalah 3 kilo ada LPG-nya Pak, LPG-nya ada 3 kilo di dalam, *gitu*. Karena secara umum, tabung itu 5 kilo, diisi 3 kilo, timbangan itu akan berhenti, sistem itu akan stop untuk mengisi LPG-nya lagi di situ untuk yang 3 kilo. Tapi dalam pemanfaatannya, 3 kilo itu tidak bisa terserap semua, tidak bisa terambil semua Pak, yang 3 kilo itu, itu yang angkanya keluar, ada 2,9, ada 2,95, jadi tidak bisa diambil semua karena sifat fisik dari LPG tersebut, tekanannya sudah habis barangkali di situ.

Terus bagaimana pemerintah menghitungnya, kalau *gitu* masyarakat tidak mendapatkan 3 kilo? Betul, masyarakat tidak dapat 3 kilo, tapi masyarakat tetap membayar jauh lebih murah daripada harga LPG yang, yang komersial. Apakah pemerintah membayar subsidiya kelebihan? Tidak Pak. Kami melakukan verifikasi setiap akhir bulan di SPBE-nya, dihitung. Tadi ada *gain*



and loss Pak di situ yang dipastikan bahwa memang perkaliannya adalah perkalian 3 kilo terhadap jumlah tabung, kemudian kita koreksi dengan LPG yang ada di dalam tangkinya di SPBE tersebut, sehingga yang didapat itu bukan perkaliannya secara murni, tapi nanti dikoreksi, dikurangi. Dikurangi ini adalah ekuivalen jumlahnya dengan jumlah LPG yang tersisa di dalam masing-masing tabung 3 kilo, Pak. Jadi secara volumenya itu yang dibayarkan untuk subsidiya itu sesuai dengan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Pak Dirjen, jadi misalnya seribu tabung, itu yang dikeluarkan SPBE itu tiga ton ya? Atau tidak sampai tiga ton?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Kalau angkanya tidak, tidak tiga ton Pak, kalau untuk tabung yang sudah, sudah dipakai.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Yang dibayar berapa?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Nah yang dipakainya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Oleh pemerintah subsidi atau oleh Pertamina ke SPBE itu?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Ya, yang dipakai itu adalah tadi yang kalau Bapak memberikan contoh misalkan berapa tadi, seribu ya, seribu tabung, artinya *kan* tiga ton. Tiga ton, di hitungan awal pasti tiga ton Pak, di perhitungan, kemudian dikoreksi, dikoreksi dengan jumlah LPG yang tersisa. Nah tersisa yang ada di tabung, itu akan sama dengan tersisa yang ada di tangki, jadi sama ini jumlahnya. Nah itu dikoreksi, jadi 3.000, nanti 3.000 dikali, dikurangi dengan berapa tersisanya, sekitar kalau di 3 kilo itu *kan* nanti angkanya di 2,9, 2,9.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Taruhlah 200 gram tersisa ya, 200 gram.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

50 gram mungkin ya, 50 sampai 100 gram. Ya 100 mungkin barangkali Pak, yang umumnya itu 100 gram.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

150 gram, 150 gram berarti 150 kilo ya? Jadi itu yang 150 kilo *nggak* dibayar oleh Pertamina ke SPBE?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Itu tidak dibayar di mana-mana Pak, karena barangnya *kan* masih ada. Barangnya masih ada, pemerintah tidak memberikan subsidi, tidak membayar subsidiya, nilai subsidiya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Iya jadi maksud saya, perhitungannya oleh, *kan* ini Pertamina dulu, baru pemerintah ke Pertamina. Berarti kalau keluar seribu tabung, Pertamina bayar tidak tiga ton ya? Kalau bukan yang pertama, bukan yang perdana *gitu*?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Iya, iya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Jadi bukan tiga ton yang dibayar?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Bukan tiga ton

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Taruhlah 2,85 ton. Rakyat bayar terus 3 kilo, Pak.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Tapi memang.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Isinya bukan 3 kilo.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Betul Pak seperti itu, tapi ini dipastikan bahwa, ya memang rakyat tidak menerima subsidi 3 kilonya. Dan, dan harga untuk yang subsidi *kan* jauh lebih murah tetap daripada, daripada harga yang komersial.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Dirjen maaf aja, transparansi informasi. Ini sebenarnya perlu, ini kurang ini. Artinya bukan apa-apa, jadi terlalu banyak kadang-kadang kita di Republik ini TST (tahu sama tahu). Jadi kalau persepsinya *kan* 3 kilo, padahal mungkin hanya 2,85 kilo, *gitu*.

Memang berarti subsidi yang dibayar, subsidi itu 2,85 kilo *kan* setiap botol. Ya itu *aja*, *nggak* apa-apa lah *udah* ini, jadi berarti bukan kesalahan si SPBE dong kalau *gitu*? Tapi kalau sampai dua koma, ditemukan oleh Pak Menteri sampai 2,5 kilo, yang 3,5, tiga apa namanya, 350 gram itu yang perlu dipertanyakan ya. Juga Pak Menteri Perdagangan menemukannya. Jempolan itu, Pak Menteri Perdagangan dapat jempolan.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Kemudian untuk kenapa tidak ada minyak tanah, kenapa tidak ada solar. Kami sebetulnya sudah menyiapkan, Bapak Pimpinan, tapi karena di dalam agenda tidak masuk, jadi kita tidak sampaikan di sini. Ya mungkin kemarin sudah juga dilakukan di BPH, di BPH.

Kemudian untuk pengawasan LPG, Ibu Direktur memang, Ibu Mustika yang melakukan pengawasan Pak, ke lapangan, baru kemarin juga datang dari Medan. Kami memang sekarang sedang melakukan kajian, seperti apa untuk melakukan upaya maksimum terkait dengan pengawasan LPG. Dengan SDM yang ada di Kementerian ESDM, khususnya yang ada di Dirjen Migas *c.q.* di Direktorat Hilir, ini sudah pasti kurang, sudah pasti kurang.

Kami sudah diskusi dengan Pak Menteri, dengan Kepala BPH untuk melihat peluang mengoptimalkan BPH untuk melakukan pengawasan LPG. Jadi sekarang sedang dilakukan kajian dari sisi regulasinya, apa yang harus dirubah, apa yang disesuaikan, di situ. Tapi diskusi ini sudah berjalan, terima kasih sudah mengingatkan juga untuk tadi beberapa masukannya untuk melihat BPH sebagai salah satu institusi yang bisa membantu untuk peningkatan pengawasan. Berdasarkan regulasi-regulasi sekarang *kan* belum bisa, sekarang belum bisa.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, interupsi Pak Ketua.



Khusus untuk pengawasan Pak, kalau BPH bertanggung jawab secara regulasi untuk BBM bersubsidi ini, termasuk penyaluran LPG 3 kilogram pengawasannya, kami tidak melihat ada semacam perubahan yang mendasar Pak, *nggak* ada. Makanya hari ini saya mengangkat isu ini karena Pak Dirjen dan jajaran mewakili pemerintah yang harus mengeluarkan regulasi untuk urusan pengawasan ini.

Kalau LPG 3 kilogram, teman-teman semua pada memberikan atensi serius, sama juga dengan kami yang ada di kawasan timur Indonesia. Urusan solar, urusan apa namanya, minyak tanah, dan yang lainnya, menjadi pergumulan yang sangat sangat-sangat-sangat serius Pak, sangat serius.

Jadi kalau pemerintah tidak *take over* dari sisi ini untuk mengeluarkan regulasi, untuk memastikan pihak-pihak terkait ini bisa menjalankan tugas pengawasannya dengan baik, kita akan lari ke mana Pak? Kita akan lari ke mana? Dan kadang-kadang kalau bahas isu ini, sampai rasanya putus asa Pak, karena turun ke lapangan, masyarakat *nggak* lihat yang lain, masyarakat lihat kami Anggota DPR RI, apalagi dari Komisi VII.

Jadi khusus untuk isu pengawasan ini nih Pak, saya *nggak* tau bagaimana bentuknya, tapi kita pikir kita usul sebaiknya *mestinya* ada semacam bentuk pengawasan yang lebih memadai dari sisi distribusinya, dari sisi perencanaannya, sehingga semua pihak bisa ikut bertanggung jawab. Kalau semua dilimpahkan ke BPH Pak, BPH cuci tangan, BPH *nggak* punya staf turun ke bawah. Begitu mereka BPH melakukan pertemuan-pertemuan sosialisasi dengan kami di masing-masing dapil, mereka cuci tangan, *nggak* ada staf BPH yang begitu banyak.

Kami mohon pengawasan terpadu semua pihak, termasuk yang ada di kabupaten/kota, sedangkan kuota dan yang lain dipegang oleh BPH. Pertamina juga cuci tangan, karena Pertamina merasa cukup hanya sampai di SPBU, kalau gas sampai di SPBE. Di bawah itu yang ritelnya, enggak lagi mau diurus, jadi akhirnya kita larinya kemana? Teriak ke kepolisian, kecuali sudah ada kasus dan itu kayak pemadam kebakaran, Pak. Kapal ditangkap, dibawa ke pelabuhan, kemudian diperiksa, tapi *udah* kadung, terjadi penyelundupan di mana-mana. Jadi kami berharap ada semacam regulasi, apapun bentuknya untuk memastikan bahwa dana subsidi yang kita putuskan ini betul-betul jatuhnya ke masyarakat.

Saya kira mungkin itu apa ya, interupsi tambahan Pak, untuk memastikan bahwa urusan subsidi ini bisa memang mendapat perhatian serius dari pemerintah, Pak Dirjen, dan jajaran. Dan saya sangat berharap, *kan* setiap tahun dokumen itu selalu ada solar dan lain-lain Pak, kali ini kita *nggak* ada apa namanya, pembahasan pendahuluan dengan pemerintah, Pak Dirjen, berkaitan dengan subsidi solar, subsidi kerosin, dan yang lain-lain. Itu bukan kewenangan BPH Pak, BPH hanya urus distribusinya ke bawah, yang penetapannya di pemerintah, makanya tadi saya tanya kenapa *nggak* ada di sini.

Teman-teman minta LPG naik, kami dari Indonesia Timur juga sangat berharap lihat angkanya supaya kita bisa memberikan masukan, solar bagaimana, kerosin bagaimana. Saya kira ini beberapa catatan Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak satu lagi, Pak Dirjen Ini catatan ya Pak. Ini angka yang Bapak sampaikan di sini, di *slide* 17 ini, prognosa 2024 8,121 metrik ton itu *nggak tally* dengan angka yang kemarin dipresentasikan Pertamina kepada kita. Pertamina memperkirakan ada kenaikan 4,4% menjadi 8,38 metrik ton, itu. Jadi mungkin ada, perlu ada penyesuaian Pak di sini. Ya paling tidak ini yang bisa kita sampaikan supaya pemerintah bisa satu suara mengenai angkanya, Pak.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Satu, satu lagi, Pak. Untuk regulasi transportasi Pak, dari sisi Pertamina untuk BBM Satu Harga, karena ini semua mencakup di dalam kuota subsidi ini Pak. Dalam pengalaman kami di Indonesia Timur, pemerintah memberikan kewenangan kepada Pertamina untuk urusan transportasi BBM Satu Harga menjadi tanggung jawabnya Pertamina. Secara ke dalam, Pertamina kemudian melakukan *bidding* atau apalah namanya, transportir yang ditunjuk atau yang menang kemudian membawa itu BBM subsidi ke berbagai penjuru di daerah 3T, BBM Satu Harga.

Di beberapa tempat kami, satu kejadian di Aru Pak, Kabupaten Kepulauan Aru, yang transportir yang membawa BBM itu kapalnya terbakar, kapal terbakar, apa yang terjadi? Secara sepihak harga BBM dinaikkan. Kok konsumen yang menanggung bebannya? Jadi kami minta regulasi-regulasi seperti begini tolong dipertimbangkan. Apapun yang terjadi karena ini BBM satu harga, jangan sampai ada kejadian seperti begini.

Yang kedua, jika ada kasus-kasus yang terjadi misalnya kapal kebakaran dan sebagainya, masyarakat menjadi ketakutan untuk membeli BBM di titik-titik tertentu. Maka kami sangat berharap titik-titik yang tidak menerima BBM Satu Harga karena peristiwa *force majeure*, entah kapal kebakaran, entah peristiwa kondisi alam yang buruk dan lain-lain, kami ingin pastikan antara pemerintah, dalam hal ini *c.q.* Dirjen Migas dengan BPH Migas, kemana itu kuotanya? Tolong dievaluasi, Pak.

Kapal terbakar, kenapa kuotanya hilang Pak? Jadi ini ada banyak-banyak soal yang terjadi berkaitan dengan masalah subsidi BBM di lapangan yang kalau *nggak* diatur baik-baik, BPH bisa *ngatur* semuanya melampaui kewenangannya, padahal ada aturan-aturan main yang *mestinya* dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk apa namanya, antar BPH dan Pertamina supaya mereka juga di lapangan juga diatur Pak dengan baik, kalau enggak kami yang di wilayah-wilayah sulit ini terus dirugikan.

Saya kira itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, silakan Pak dilanjutkan.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Terima kasih.

Terakhir dari Pak Eddy, terkait dengan revisi Perpres 191. Kalau dalam pandangan kami, sudah, sudah mendekati akhir Pak, dari sisi pembahasan. Kebetulan dua hari yang lalu kami juga rapat di Menko Perekonomian, di sana memang dikoordinasikan di sana, *gitu*. Sudah terlihat matriks untuk siapa yang berhak menerimanya *gitu* ya, termasuk mekanisme untuk memastikan bahwa kuota itu bisa dijaga.

Memang tadi ada masukan dari Ibu Mercy, bagaimana kita memastikan untuk yang kapal. *Kan, kan* dia bisa jual, tapi menurut saya itu memang, itu *kan* sudah mencuri *kan* kalau *udah gitu, gitu* ya. Dia ini kemudian menjual, *kan* itu pasti tidak boleh sebetulnya *kan* Bu, *gitu*, tapi itu menjadi modus yang barangkali sering terjadi. Sekarang yang sedang, kami sedang memikirkan cara-caranya seperti apa, mungkin teknologi akan membantu untuk hal tersebut, apa *barcode*, atau segala macam *gitu* ya di sana. Tapi dari sisi pembahasan, karena sudah berkali-kali kami lakukan koordinasi di Menko Perekonomian, jadi mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa selesai untuk revisi Perpres 191.

Untuk jargas IKN, memang ini pendekatannya dilakukan oleh langsung oleh badan usaha oleh BUMN. Tadi yang Pak Willy untuk di sana, bahwa ini oleh PGN nanti akan mengembangkan di situ, dan kami juga memang terus mendorong supaya jargas ini dikembangkan tidak hanya berbasis APBN, tapi juga berbasis memang kerja sama antara pemerintah dengan, dengan publik Pak untuk, kita sudah pernah melakukan lelang untuk hal ini, masih dilihat dari sisi komersialnya di lapangan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua, Ketua Rapat.

Pak Dirjen, tolong dievaluasi di internal, kalau nanti LPG, ini *kan* program Bapak Presiden terpilih, makan bergizi gratis, itu *kan* nanti banyak di kecamatan-kecamatan juga. Itu nanti LPG yang *make* itu mau dimasukkan LPG bersubsidi atau nonsubsidi? Tolong bikin evaluasi aja di dalam. Karena itu nanti di mana-mana itu, Pak. Ya Pak ya, Pak Dirjen, dikasih tugas dulu ke timnya.



PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Iya siap, terima kasih, Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Iya supaya ini, *cost*-nya juga jangan terlalu tinggi, karena ini *kan* rakyat harus diberi makanan bergizi gratis, supaya pintar-pintar, sehat, yang rakyat-rakyat kecil jadi kokoh *gitu*, jadi jenius-jenius, iya. Jadi bangsa ini akan lebih kompetitif di antara bangsa-bangsa di dunia.

Makasih, Pak Ketua.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sedikit Pak Dirjen, kebetulan saya tadi di jalan dapat sedikit pertanyaan dari teman-teman terkait anggaran, Pak. Di sini kapan terjadi persetujuan di Komisi VII? Katanya tadi ada pernyataan bahwa Komisi VII menyetujui *kan*. Saya selaku Pimpinan belum pernah *gitu*, persetujuan terkait anggaran CISEM ini. Tolong *dijelasin*, Pak.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Makasih, Pimpinan.

Anggaran CISEM dari awal pun sudah ada Pak, di dalam DIPA kami. DIPA kami, kemudian di dalam proses raker dilakukan revisi, dilakukan revisi, kemudian disahkan oleh Pimpinan.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya tanya Pak, waktu itu saya menolak pemindahan anggaran dari Eselon I lainnya. Makanya saya *pengen* klarifikasi, pernah *nggak* kami ada persetujuan? Saya salah satu Pimpinan di Komisi VII, merasa tidak pernah, karena saya merasa saat itu tidak, belum waktunya *kan*. Toh di bulan ini juga *udah* ada pembahasan anggaran.

Jadi kalau sampai ada apa namanya, persetujuan tanpa sepengetahuan atau dilakukan persetujuan tanpa mekanisme sesuai peraturan Kemenkeu atau anggaran yang berlaku di DPR *kan*, saya tidak bertanggung jawab dan saya *nyatakan* bahwa anggaran itu ilegal, *gitu*. Makanya saya *pengen dijelasin*, siapa yang menyetujui *gitu*. Minta penjelasan, Pak.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):



Iya, terima kasih Pak Pimpinan.

Memang Bapak waktu itu lagi di luar kota.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Engga, saya *nggak* di luar kota, saya menolak, saya ada. Tidak benar Bapak kalau bilang di luar kota, saya tidak bersedia, *kan gitu*. Jadi Bapak berbohong kalo bilang saya di luar kota, saya ada di Jakarta, saya ada di ruangan Pimpinan. Bapak mengajukan, saya bilang belum waktunya, pakai anggaran yang ada. Bapak *contempt of parliament* kalau begitu, Bapak melakukan hal-hal yang diluar ketentuan undang-undang, *kan*.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Dan kami ditandatangani oleh Pimpinan yang lain sesuai dengan aturan.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, *nggak* apa-apa kalau *gitu*. Entar kami akan tanyakan ke Dirjen Anggaran.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Baik, terima kasih.

Demikian penjelasan dari kami, Pak Pimpinan, kami kembalikan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya masih ada atau cukup? Kita lantasi, karena juga jawaban tertulis selebihnya yang belum dialami secara, eh belum dijawab secara lengkap.

Baiklah, coba kita simak tentang draf kesimpulan rapat hari ini, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia.

1. Komisi VII DPR RI mendorong Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk mempercepat eksplorasi temuan dan cadangan Migas nasional, serta menjaga *kondusifitas* iklim investasi migas di Indonesia.

Setuju?



**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia dan *stakeholder* lainnya di bawah koordinasi Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk segera mengatasi kelangkaan dan potensi penyalahgunaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji atau SPBE agar distribusi LPG 3 kilogram tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan subsidi pemerintah.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Jadi agar LPG 3 kilogram, jadi langsung *aja*, agar LPG 3 kilogram yang digunakan konsumen, ya tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan subsidi pemerintah.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Coba secara keseluruhan kita baca ulang apa, menjadi satu kesatuan redaksional yang jauh lebih baik.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia dan *stakeholder* lainnya di bawah koordinasi Kementerian ESDM untuk segera mengatasi kelangkaan dan potensi penyalahgunaan di stasiun SPBE ya, agar LPG 3 kilogram yang digunakan konsumen tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Dan tidak menyalahgunakan subsidi pemerintah.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, tambahan Pak Ketua.

Di sini tidak urusannya cuman LPG 3 kilogram, jadi saya menambahkan seluruh subsidi energi BBM dan LPG 3 kilogram. Jadi baik yang JBT maupun JBKP ya.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Termasuk solar dan gas, termasuk di dalamnya ya, subsidi energi. Berarti semua energi termasuk listrik?



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Kalau boleh bisa dipisah dua lah, dipisah.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Atau dibikin poin A poin B.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Poin berikutnya lah *gitu*, poin 3. LPG-LPG, BBM-BBM, *kan gitu*. Besar-besar semua itu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Mungkin usul konkret untuk segera mengatasi titik dua, A. kelangkaan dan potensi penyalahgunaan di stasiun pengisian bahan bakar LPG SPBE. Bisa *nggak* dibikin poin A dan B? Mengatasi titik dua, A, titik dua, A. kelangkaan dan potensi penyalahgunaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), LPG 3 kilogram yang digunakan konsumen, yang digunakan konsumen. B.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Jadi A itu terkait dengan LPG, yang B terkait dengan BBM subsidi.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya, B, ya segera mengatasi kelangkaan, sama juga ya, kelangkaan dan potensi penyalahgunaan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu cukup sih, LPG dan BBM subsidi.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Sebenarnya iya, sama aja karena.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tidak perlu A, B maksudnya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ya *nggak* apa-apa lah kalau mau dipertegas.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT DARI SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI MENJADI H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI)

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi mungkin yang kita perlu perbaiki susunan kalimat saja, itu *kan* sebetulnya LPG 3 kilo dan seluruhnya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Kelangkaan dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, baik JBT maupun JBKP, Jenis Bahan Bakar Tertentu dan jenis bahan bakar apa penugasan itu, penugasan khusus, JB, JBKP ya. Segera mengatasi kelangkaan dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, baik JBT dan JBKP secara apa ya, secara komprehensif, bertanggung jawab, jangan bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan, mungkin *gitu* kali aja ya. Akuntabel dan transparan, iya, transparan, bagian bawahnya, di bagian bawah, bukan poin A poin B. Baru ditambahkan itu yang tadi, yang tujuannya tidak merugikan, yang tujuannya tidak merugikan konsumen dan penyalahgunaan subsidi energi.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin, Pimpinan dan Ibu Mercy.

Kalau kita baca A dan B itu sebetulnya 70% mirip itu. Cuma bedanya adalah yang A itu kita sepakat itu untuk LPG saja, yang B itu untuk BBM subsidi. Poinnya adalah, ini *kan* harus bagaimana mengatasi kelangkaan dan mengatasi potensi penyalahgunaan. Nah kalimatnya kita perbaiki aja, jangan terlalu muter-muter begitu, silakan TA diperbaiki.

Nah, yang A itu kelangkaan dan potensi penyalahgunaan di stasiun pengisian bahan bakar agar LPG 3 kilo yang digunakan konsumen tidak merugikan konsumen. LPG 3 kilo itu sudah pasti digunakan konsumen, jadi menurut saya dihilangkan saja yang digunakan konsumen itu, tidak merugikan, ya oke.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Oleh Pimpinan ke TA, jadi yang A soal LPG 3 kilogram sekarang yang aktual bukan kelangkaan, potensi penyalahgunaan. Nah B, yang BBM itu, itu yang kelangkaan.

Kalau itu penyalahgunaan yang lagi aktual, hasil, hasil penemuan dari Bapak Menteri Perdagangan ya. Itu baru yang B, hasil penemuannya Bu Mercy itu kelangkaan *gitu*. Mumpung ini lagi interupsi, nanti Pak Dirjen dijelaskan berapa ratus miliar sih yang dioper-oper tadi itu, yang disampaikan Pak

Pimpinan tadi, nanti dijelaskan lagi itu berapa ratus miliar yang di oper-oper anggaran itu.

Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, ayo Pak Bambang mungkin ada.

F-GERINDRA (H. BAMBANG HARYADI, S.E.):

Jadi kalau yang LPG 3 kilo sebenarnya lebih kepada pengawasannya *kan*, makanya saya pikir ke depan di Undang-Undang Migas, kita pisahkan lah ini *kan*. Hilir itu harus kita serahkan ke lembaga sendiri, *nggak* ada fungsi mereka ini *kan, gitu*. Makanya terkait anggaran tadi, catatan buat fraksi kami, Partai Gerindra, karena ini Sekjen *nggak* pernah *nganggap* nih, kita *fight* kedepannya dan kami Fraksi Partai Gerindra *ngerasa* diabaikan sama anda.

Kami, anda punya catatan khusus buat kami. Jadi saya pikir itu, terkait pengawasan LPG 3 kilo, ini lemahnya sistem pengawasan karena melekat di Dirjen Migas *kan*. Makanya itu ketentuan undang-undang terkait BPH atau entar di revisi Undang-Undang Migas itu akan kita perkuat fungsi pengawasan, apakah ada tetap di Kementerian ESDM atautkah kita pisahkan. Bahkan termasuk juga saya sedih SKK Migas masih di bawah kendali, di bawah kendali Kementerian ESDM. Kami mendorong bahwa SKK Migas harus berdiri sendiri terpisah dengan Kementerian ESDM.

F-NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, saya kira ini usulan-usulan kelembagaan ini juga menjadi penting, menjadi catatan, ya *insya* Allah nanti di kabinet baru mungkin Pak Bambang menjadi *concern* kita.

Jadi kembali kepada kesimpulan ini *gimana?* Apa potensi penyalahgunaan stasiun pengisian bahan bakar LPG 3 kilo tidak menimbulkan kerugian dan menyalahgunakan subsidi energi.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Kalimatnya agak *muter-muter* itu ya.

F-NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebetulnya bisa satu kesatuan kalimat ini sih tadi, asal memang.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Karena di awal sudah ada kata-kata penyalahgunaan, kemudian di ujung juga kalimat penyalahgunaan. Jadi mungkin yang di ujung itu tidak menyalahgunakan subsidi, tidak merugikan konsumen, titik *udah*, sudah ya. Ya, B, turun ke bawah, oke.

F-NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Segera mengatasi kelangkaan dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, baik Jenis BBM Tertentu (JBT).

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Agar LPG 3 kilo tidak merugikan konsumen.

F-NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPR RI):

B-nya itu juga? Ya *kan* ada transparan, akuntabel, komprehensif.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ditambahkan terutama di kawasan daerah 3T. *Kan* Timur masuk perbatasan Kalimantan, Sumatera.

F-NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, utamanya di daerah, eh wilayah 3T.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jangan *double* lagi, di wilayah 3T atau kawasan 3T *aja*, jangan wilayah kawasan lagi, iya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Mungkin yang A itu supaya lebih *nohok*, potensi pengurangan isi LPG 3 kilogram bersubsidi di stasiun, di SPBE, agar tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan subsidi energi dari pemerintah *gitu aja*, atau dari negara. Karena ada potensi pengurangan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Kata menyalahgunakan dihilangkan *aja*, Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Engga, di atas *udah nggak* ada penyalahgunaan. Jadi potensi.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Tidak merugikan konsumen dan subsidi energi aja langsung *gitu loh*.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Karena subsidi itu bukan *profit and loss*, tapi disalahgunakan. Jadi salah gunakan itu. Kalau ke konsumen, *profit and loss*, dia beli 3 kilo harus dapat 3 kilo, *loss* dia, rugi dia.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Sebenarnya di poin A, untuk anak kalimat “agar tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan subsidi energi” itu berlaku sebenarnya untuk dua-dua, A dan B. Jadi saya mengusulkan, “agar tidak merugikan konsumen dan menyalahgunakan subsidi” dikeluarkan jadi anak kalimat di bawah poin A dan B.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Lebih baik A-A bikin *gitu*, B-B bikin *gitu*, karena *case*-nya beda.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Kalau *gitu* tinggal di *copy* aja. Oke, ya.

Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi bisa disepakati ya butir, kok itu 3, 3B? Nah oke, baik, oke. Pak Plt. Dirjen, *gimana* untuk butir 2? Bisa ya, setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik.

3. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk melakukan revisi terkait asumsi *lifting* migas tahun 2024 dan target 1 juta BOPD dan 12.000 *billion scaff* per *day* untuk tahun 2030 sesuai capaian yang lebih realistis.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak, Pak Ketua, poin, poin 3 ini karena ini *kan* berkaitan dengan pencapaian target 1 juta BOPD, jadi melakukan revisi terkait asumsi *lifting* migas tahun 2024 dengan *roadmap* yang jelas untuk merubah target satu juta, untuk, bukan untuk merubah, untuk mencapai, untuk mencapai target 1 juta BOPD dan 12.000 MMSCFD tahun 2030 titik. Jadi sesuai capaian realistis hilang, Pak.

Capaian tanpa *roadmap* percuma Pak. Yang kita butuh sesungguhnya adalah kejelasan *roadmap*, ini benar bisa dicapai atau tidak Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya kira kalau begitu, Bu Mercy, tahun 2030-nya dihapus *aja*, karena untuk mencapai target 1 juta barel itu, itu kapan kira-kira. Jadi *roadmap*-nya untuk mencapai target itu, kalau memang itu masih targetnya atau kita balik, tahun 2030 targetnya berapa yang realistis. Bagaimana Ibu-Bapak?

Jadi dengan *roadmap* yang jelas untuk mencapai target *lifting* di tahun 2030, atau *roadmap* yang jelas untuk mencapai target 1 juta *barrel oil per day* dan 12.000.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Mungkin *roadmap* yang jelas untuk mencapai target 1 juta BOPD dan 12.000 MMSCFD dan target realistis yang bisa dicapai di tahun 2020, 2030. Tapi kalau begini ya kita jadi sangat apa, *flexible* banget *gitu loh*, kesannya kita tidak ada target sama sekali jadinya. Kita melepas ini ke mekanisme *business as usual* aja, berapa yang bisa dicapai ya itu, *mestinya kan* harus ada daya ungkit nya Pak. Iya, saya cuma kasih masukan aja Pak.

F-GERINDRA (H. BAMBANG HARYADI, S.E.):

Kan toh minggu depan kita akan rapat dengan teman-teman komisi eh apa, Eselon I, terkait APBN, asumsi semua *kan*, dalam minggu-minggu, minggu-minggu depan ya. Termasuk juga tadi persoalan tadi juga kita akan *review kan*.

Kami itu bukan apa Pak Dadan, kami kenapa itu kemarin ini, karena kami harus melalui mekanisme. Teman-teman kemarin Anggota Komisi VII belum ada paparan terkait rencana pengalihan anggaran. Itu kami fraksi kami agak bersikukuh di situ, paparkan dulu. Terlebih lagi proyek ini lagi, kami dengar lagi *dilidik* oleh aparat penegak hukum, *gitu loh*, kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Ini untuk keselamatan kita semua *kan*, eh diam-diam anda jalankan tanpa prosedural, ya sudah silakan *aja*. Yang jelas fraksi kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi ke depan *gitu*.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Gimana, begini? Pak Dadan gimana Pak, untuk yang nomor 3 ini?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Tadi kami sudah menyampaikan Pak, dari sisi yang *roadmap* yang 2024, 2025, sampai 2029. Angkanya memang kami yang sampaikan adalah 597 Pak dan, dan kami tidak mendapatkan diskusi bahwa itu harus, harus disesuaikan *gitu* yang 597, yang tadi banyak sekali masukan adalah untuk yang target 1 juta dan 12.000, Pak. Di sini *kan* diminta kami untuk melakukan revisi untuk yang.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Lifting migas 2024, itu.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Pimpinan, saya ada satu hal yang saya belum *nangkep* ini. Kita minta dan mengundang Pak Dirjen dan jajaran datang ke sini, ini *kan* untuk membahas terkait dengan *lifting* dan sebagainya. Kalau kemudian kita minta lakukan revisi, ini *exit* untuk keluar dari masalah? *Kan* bukan begitu. Justru kita ingin meminta pertanggungjawaban bagaimana terkait dengan asumsi *lifting* yang sudah dipatok, bagaimana *effort* kita mengawal itu.

Kalau kemudian kata, kalimatnya adalah untuk melakukan revisi, ini kita kok mau keluar dari masalah, lalu ngapain ditentukan asumsi itu? Kalau begitu setiap kali kita ada masalah, kita revisi saja. Saya keberatan dengan kata-kata melakukan revisi, menolak saya, karena saya pikir pertemuan kita pada hari ini, ingin tau masalahnya apa sih, lalu apa *effort* kita untuk menuju kepada target yang sudah kita tentukan, bukan untuk melakukan revisi. *Effort* kita seperti itu, harusnya seperti itu rapat ini. Jadi saya keberatan dengan kata-kata itu Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya udah, kalau gitu kita menggunakan kata evaluasi ya? *Gimana?* Pak Dirjen, bagaimana Pak?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Saya setuju, Pak.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke baik, setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Komisi VII DPR RI mendorong Plt. Dirjen jalan Migas Kementerian ESDM untuk menyelesaikan berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi (minyak tanah dan minyak solar) di wilayah Indonesia Timur.

Untuk poin B ya, oke karena *redundant* kita hilangkan, oke.

4. Komisi VII DPR RI mendorong Plt. Dirjen Migas ESDM untuk menyelesaikan pembangunan jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang sesuai, tahap 2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Saya kira itu sangat normatif. Pak Dirjen, ya setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Oke, dan terakhir. Komisi VII DPR RI meminta, apa? Oh perlu masukan.

Baik.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, itu poin 5 perlu terukur tuh kapan mau disampaikan, *kan nggak* mungkin sekarang.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu *kan* nanti ada Pak, jawabannya *kan* minggu depan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Yang poin 5?

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, semuanya yang diminta ini jawabannya minggu depan, Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Oh iya, baik.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke ya.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan secara detail proses alokasi dan penggunaan anggaran untuk pembangunan proyek CISEM tahap 2.

Jadi *sources and uses of funds*-nya Pak, itu yang diminta. Setuju Pak Dirjen? Baik ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Dan semua jawaban, yang terakhir,

6. Semua jawaban untuk disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2024.

Pak Dirjen, setuju?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Sedikit ada kelewat Pak, poin 2 Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Apa itu?

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Yang SPBE Pak, sebetulnya singkatannya itu, memang saya juga mengartikannya kadang sama dengan ini, tapi sebetulnya singkatan resminya itu SPBE itu adalah Stasiun Pengisian *Bulk* Elpiji.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bulk elpiji, oke baik, hanya itu saja ya revisinya Pak? Baik, setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**



Baik Ibu-Bapak, dengan demikian kita telah menyelesaikan Rapat Dengar Pendapat hari ini, sebelum kita tutup, saya persilakan Plt. Dirjen untuk menyampaikan sambutan penutupan, Pak.

PLT DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI RI (Dr. Ir. DADAN KUSDIANA, M.Sc.):

Bapak-Bapak Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Terima kasih atas segala masukan, atas segala komentar, dan kami untuk khusus terkait yang pertanyaan, kami akan sampaikan jawabannya sesuai dengan tata waktu yang tadi diminta, satu minggu ke depan.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran.

Kepada Pimpinan, Anggota Komisi VII, kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasinya dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, bersama ini kami menyatakan rapat ditutup.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT: SELESAI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.41 WIB)
(KETUK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 1969031319900320

